

PARTISIPASI SISWA DALAM IMPLEMENTASI PLH (PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP) DI SMP N 7 YOGYAKARTA

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan



Oleh
Satya Laksana
NIM 13110241034

**PROGRAM STUDI KEBIJAKAN PENDIDIKAN
JURUSAN FILSAFAT DAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
JULI 2017**

**PARTISIPASI SISWA DALAM IMPLEMENTASI PLH (PENDIDIKAN
LINGKUNGAN HIDUP) DI SMP N 7 YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan



Oleh
Satya Laksana
NIM 13110241034

**PROGRAM STUDI KEBIJAKAN PENDIDIKAN
JURUSAN FILSAFAT DAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
JULI 2017**

PARTISIPASI SISWA DALAM IMPLEMENTASI PLH (PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP) di SMPN 7 YOGYAKARTA

Oleh
Satya Laksana
NIM 13110241034

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tentang partisipasi siswa dalam implementasi PLH (Pendidikan Lingkungan Hidup) di SMPN 7 Yogyakarta. Mengidentifikasi faktor yang mendukung dan menghambat Implementasi Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) di SMP N 7 Yogyakarta.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah siswa, guru dan kepala sekolah. Setting penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 7 Yogyakarta. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) diamanatkan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH). Partisipasi siswa dalam implementasi PLH (Pendidikan Lingkungan Hidup) di SMPN 7 Yogyakarta berada pada tangga *tokenisme*; pada hierarki *engagement*. Pada 6 aspek menunjukkan bahwa pada yang sudah berjalan; badan pelaksana siswa, menularkan kepada teman temannya tentang PLH, sikap belum semuanya menyikapi tapi sudah lebih baik daripada sebelumnya, sumber daya fasilitas dari BLH, komunikasi sudah berjalan dan dibantu *social media*. Faktor pendukung yaitu kesadaran siswa dalam hidup bersih dalam kehidupan sehari-hari, dukungan dari sekolah yang memberikan reward kepada kelas yang terbersih agar memotivasi kelas lainnya untuk melakukan hal serupa, pemberian bantuan dari Badan Lingkungan Hidup berupa, dukungan orang tua agar membawakan bekal kepada anaknya, dukungan sekolah meskipun belum berjalan secara efektif. Lalu ditemukan juga beberapa faktor penghambat yaitu, belum mempunyai kesadaran agar berperilaku hidup bersih, pihak sekolah tidak mempunyai cadangan, kurangnya komunikasi antara siswa dengan pihak sekolah.

Kata Kunci: *Partisipasi Siswa, Implementasi Kebijakan, PLH, Pendidikan Lingkungan Hidup*

**THE STUDENTS PARTICIPATION IN THE IMPLEMENTATION OF LIVING
ENVIRONMENT EDUCATION (PLH) AT YOGYAKARTA 7 JUNIOR HIGH
SCHOOL**

By:

Satya Laksana
NIM 13110241034

Abstract

This research aimed to describe the students' participation in the implementation of living environment education (PLH) at Yogyakarta 7 Junior High School, to acquire the information regarding students' participation in the implementation of Living Environment Education (PLH) at Yogyakarta 7 JHS, to identify the supporting and inhibiting factors of the implementation of PLH at Yogyakarta 7 JHS.

This research is qualitative descriptive type of research. The subjects in this research were students, teachers, and headmaster. This research was set at Yogyakarta 7 JHS. Data was collected by conducting observation, interview, and documentation with the stages of data collection, data reduction, and data presentation. Data validity was clarified by the source triangulation technique.

The research results showed that: 1) the Living Environment Education is mandated by The Living Environment Agency (BLH), 2) the students' participations in the PLH at Yogyakarta 7 JHS are: a) the participation is at the tokenism level and b) the participation is at hierarchy engagement status. There are six aspects of students' implementations, which are: 1) Purpose, 2) Operational Board, 3) Impact, 4) Attitude, 5) Resources, and 6) Communication. There are also several supporting factors, such as 1) the students' awareness of hygiene living in daily occasion, 2) the school support to give rewards towards the cleanest student in order to motivate the other classes to conduct similar action, 3) the support from the BLH in the form of hygiene plastic bags, burlap, and drums, thus the garbage would be disposed to these containers, 4) the parents support for providing school lunch/meal for their children, 5) the school support although it has not been effectively running. There are several inhibiting factors as well, namely 1) Not 100% of students are currently aware of hygiene living behavior, 2) school does not own the replacement supplies for plastic bags and burlaps, 3) the lack of communication between students and the school officer, 4) Not 100% of parents are currently providing the school lunch/meal for their children during the school time.

Keywords: *Students' Participation, Policy Implementation, PLH, Living Environment Education*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Satya Laksana

NIM : 13110241034

Program Studi : Kebijakan Pendidikan

Judul TAS : Partisipasi Siswa Dalam Implementasi PLH (Pendidikan Lingkungan Hidup) di SMP N 7 Yogyakarta

menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Yogyakarta, 19 Juli 2017

Yang menyatakan,



Satya Laksana
NIM 13110241034

LEMBAR PERSETUJUAN

Tugas Akhir Skripsi dengan Judul

PARTISIPASI SISWA DALAM IMPLEMENTASI PLH (PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP) DI SMP N 7 YOGYAKARTA

Disusun Oleh:

Satya Laksana
NIM 13110241034

telah memenuhi syarat dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dilaksanakan


Ujian Akhir Tugas Akhir Skripsi bagi yang bersangkutan

Yogyakarta, 20 Juni 2017

Mengetahui,
Ketua Program Studi


Dr. Arif Rohman, M.Si.
NIP. 19670329 199412 1002

Disetujui,
Dosen Pembimbing,


Ariefa Efaningrum, M. Si.
NIP. 19740411 199802 2004

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir Skripsi

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir Skripsi

PARTISIPASI SISWA DALAM IMPLEMENTASI PLH (PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP) DI SMP N 7 YOGYAKARTA

Disusun Oleh:

Satya Laksana
NIM 13110241034

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir Skripsi
Program Studi Kebijakan Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta
Pada Tanggal 11 Juli 2017

TIM PENGUJI

Nama/Jabatan

Tanda Tangan

Tanggal

Ariefa Efianingrum, M.Si
Ketua Penguji/Pembimbing



13-Juli-2017

L. Hendrowibowo, M.Pd.
Sekretaris



13-Juli-2017

Bambang Saptono, M.Si.
Penguji Utama




13-Juli-2017

19 JUL 2017

Yogyakarta,

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta
Dekan,




Dr. Haryanto, M.Pd.

NIP. 19600902 198702 1 001

MOTTO

“Seseorang muslim tidaklah menanam sebatang pohon atau menabur benih ke tanah, lalu datang burung atau manusia atau binatang memakan sebagian daripadanya, melainkan apa yang dimakan itu merupakan sedekahnya”

(H.R. Anas R.A)

“Jangan terlalu lama terisolasi tradisi, berangkat dan butakanlah prediksi hari nanti”

(Erros Chandra)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua tercinta yang sesungguhnya jauh lebih lelah daripadaku, yang selalu memberi motivasi dan doa, serta memberikan pengorbanan yang sangat luar biasa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga saya bisa menjadi kebanggaan mereka.
2. Almamater Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan, khususnya program studi Kebijakan Pendidikan.
3. Nusa dan bangsa Indonesia.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PARTISIPASI SISWA DALAM IMPLEMENTASI PLH (PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP) di SMP NEGERI 7 YOGYAKARTA”. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari doa dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, terimakasih telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, yang telah memberikan fasilitas dan sarana sehingga studi saya berjalan lancar.
3. Ketua Jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan yang telah memberikan kelancaran dalam proses penelitian ini.
4. Ibu Ariefa Efianingrum, M. Si. selaku dosen pembimbing yang telah berkenan mengarahkan, memberi masukan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Almarhum ibu Yulia Ch. Nany Sutarini, M.Si. serta bapak Drs. Murtamadj, M.Si. selaku dosen Pengampu Akademik yang telah mengarahkan, memberi masukan selama penulis menjalankan aktifitas akademiknya di kampus UNY.
6. Seluruh dosen Prodi Kebijakan Pendidikan yang telah memberikan ilmu, inspirasi, dan dorongan selama kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta.
7. Kepala Sekolah, guru-guru, karyawan, dan siswa SMP Negeri 7 Yogyakarta yang telah menerima penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan informasi.
8. Bapak Sumarno dan Ibu Sri Sukarjilah dan saudara saya tercinta, Dwi Bagus Yuniarto yang telah memberikan doa, dukungan, nasehat, dan semangat, serta memberikan motivasi hingga terselesaikannya skripsi ini.

7. Kepala Sekolah, guru-guru, karyawan, dan siswa SMP Negeri 7 Yogyakarta yang telah menerima penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan informasi.
8. Bapak Sumarno dan Ibu Sri Sukarjilah dan saudara saya tercinta, Dwi Bagas Yuniarto yang telah memberikan doa, dukungan, nasehat, dan semangat, serta memberikan motivasi hingga terselesaikannya skripsi ini.
9. Sahabat-sahabatku, Ayung, Berlian, Dipto, Kun, Wulan, Destianto, Anggi, Abdul, Sigit, Yulia, Teh Ayu yang telah memberikan lingkungan yang positif kepada penulis.
10. Keluarga di HIMA KP FIP UNY 2014 dan 2015 yang senantiasa memberikan pelajaran tentang kekeluargaan, kebermanfaatan terhadap sesama, dan perjuangan untuk mendapatkan impian.
11. Teman-teman seperjuangan di Kebijakan Pendidikan 2013, yang telah memberikan banyak pelajaran dan kenangan manis selama kuliah. Semoga pertemanan kita selalu terjaga.
12. Mas Dana, Mas Rinda, Mbak Jian, Mas Arif, Mas Meda, Mbak Wulan, Mbak Icha, Mbak Olik, Mbak Tina, Mas Latif selaku senior saya di HIMA KP FIP UNY.
13. Fauzi selaku wakil kadiv PSDM beserta staff PSDM Onik, Munah, Koko, Irul
14. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Semoga segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal yang diterima dan mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Terima kasih.

Yogyakarta, 20 Juni 2017

Yang Menyatakan,



Satya Laksana

NIM 13110241034

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Batasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	7
 BAB II KAJIAN TEORI	
A. Deskripsi Teori	9
1. Kebijakan	9
a. Pengertian kebijakan	9
b. Pengertian Kebijakan Pendidikan	10
2. Implementasi Kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup	16
a. Implementasi kebijakan pendidikan.....	16
b. Teori implementasi kebijakan pendidikan	19
c. Kebijakan pendidikan lingkungan hidup.....	24

3. Partisipasi	29
a. Definisi partisipasi	29
b. Prinsip-prinsip partisipasi	31
c. Tujuan partisipasi	31
d. Macam-macam partisipasi	33
e. Indikator keberhasilan partisipasi	35
f. Hierarki Partisipasi	36
4. Pengelolaan Lingkungan Hidup	38
a. Lingkungan Hidup	46
1) Pengertian Lingkungan Hidup	46
2) Macam-macam Lingkungan Hidup.....	48
b. Pendidikan Lingkungan Hidup	49
1) Pengertian Pendidikan Lingkungan Hidup	49
2) Tujuan Pendidikan Lingkungan Hidup	50
3) Sasaran Pendidikan Lingkungan Hidup	50
4) Ruang Lingkup.....	51
5) Landasan Kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup	53
B. Penelitian Yang Relevan	53
C. Kerangka Berfikir.....	56
D. Pertanyaan Penelitian	58

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian	60
B. Tempat dan Waktu Penelitian	61
C. Subjek dan Penelitian	61
D. Teknik Pengumpulan Data	62
E. Instrumen Penelitian	64
F. Uji Keabsahan Data	66
G. Teknik Analisis Data	66
H. Keabsahan Data	68

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi SMP N 7 Yogyakarta	70
1. Sejarah SMP N 7 Yogyakarta	70
2. Visi Misi SMP N 7 Yogyakarta	71
3. Tujuan pendidikan SMP N 7 Yogyakarta	72
4. Indikator keberhasilan pendidikan SMP N 7 Yogyakarta.....	72
5. Struktur Organisasi SMP N 7 Yogyakarta	73
6. Fasilitas SMP N 7 Yogyakarta	74
7. Tata Tertib	76
B. Deskripsi Data Hasil Penelitian	86
1. Partisipasi siswa dalam PLH	86
2. Implementasi siswa dalam PLH	88
3. Faktor pendukung dan penghambat PLH.....	99
C. Pembahasan	101
1. Partisipasi siswa dalam PLH	101
2. Implementasi siswa dalam PLH	105
3. Faktor pendukung dan penghambat PLH.....	112

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	114
B. Saran.....	116
C. Keterbatasan Penelitian	116

DAFTAR PUSTAKA	145
-----------------------------	------------

LAMPIRAN.....	148
----------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tangga Partisipasi	36
Tabel 2. Hierarki Partisipasi.....	37
Tabe 3. Waktu Pelaksanaan Penelitian	63
Tabel 4. Kisi Kisi Pedoman Observasi	66
Tabel 5. Kisi Kisi Pedoman Wawancara.....	66
Tabel 6. Pedoman Dokumentasi	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi SMP N 7 Yogyakarta	74
Gambar 2. Rapat Siswa	94
Gambar 3. Rapat Siswa 2	94
Gambar 4. Lorong Kelas	86
Gambar 5. Halaman Sekolah.....	86
Gambar 6. Halaman Taman	96
Gambar 7. Menyapu.....	97
Gambar 8. Mengambil Sampah	99
Gambar 9. Bak Sampah.....	100
Gambar 10. Gerobak Sampah	101
Gambar 11. Memilah Sampah.....	103

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Tahap Kebijakan	15
Bagan 2. Model The Implementation Process	20
Bagan 3. Kerangka Berpikir.....	59
Bagan 4. Komponen dalam analisis data model Miles and Huberman.....	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat-surat izin penelitian.....	120
Lampiran 2. Pedoman observasi, wawancara, dan dokumentasi	124
Lampiran 3. Analisis hasil wawancara.....	131
Lampiran 4. Dokumentasi Foto.....	147

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di abad ke-21 ini, isu lingkungan menjadi fenomena paling mendunia. Hal ini dipicu dengan adanya perubahan iklim karena meningkatnya karbon di udara yang disebut dengan pemanasan global. Pemanasan global salah satunya disebabkan oleh penggundulan hutan yang dilakukan oleh sekelompok manusia yang tidak bertanggungjawab. Penggundulan hutan menyebabkan hilangnya kemampuan alam dalam menyerap karbon di udara. Peningkatan karbon di udara menyebabkan hawa panas menyelimuti bumi (lingkunganhidup.co/20-Februari-2017).

Pemanasan global di dunia dipercepat dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor. Sejak terjadi Perang Dunia II, jumlah kendaraan bermotor di dunia bertambah dari 40 juta menjadi 680 juta. Kendaraan bermotor merupakan salah satu produk manusia yang menyebabkan adanya emisi karbon dioksida pada atmosfer.

Beberapa paparan kondisi dunia di atas mengidentifikasikan bahwa manusia merupakan pemeran utama dalam kelangsungan rusak/tidaknya lingkungan (Worosuprojo, 2008: 3). Sama halnya yang telah diungkapkan Worosuprojo (2008: 3), manusia juga mempunyai peran penting dalam menjaga lingkungan yang ada di sekitarnya. Manusia yang dapat menjadikan lingkungan tersebut tetap damai dan tidak ada kerusakan.

Penghijauan sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan salah satu upaya dunia dalam menghadapi kerusakan lingkungan yang perlu

mendapat perhatian serta penanganan secara serius dan berkelanjutan. Masalah lingkungan hidup merupakan masalah bersama. Oleh karena itu, sudah sepatutnya masalah ini menjadi kepedulian dan upaya bersama.

Salah satu upaya penanganan kerusakan lingkungan dapat dilakukan melalui aspek pendidikan. Lembaga pendidikan sudah sepatutnya menjadi wadah dalam memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang pentingnya pelestarian lingkungan. Sekolah diharapkan mampu membangkitkan kepedulian lingkungan pada generasi muda, melalui siswanya. Siswa diharapkan dapat menjaga kualitas dan dituntut untuk meningkatkan upaya pelestarian lingkungan yang ada di dalam sekolah maupun di luar sekolah.

Salah satu kebijakan pendidikan yang relevan pada upaya pelestarian lingkungan hidup adalah Program Adiwiyata. Program Adiwiyata merupakan salah satu Kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) yang telah disepakati pada tanggal 19 Februari 2004 oleh 4 departemen, yaitu Kementrian Negara Lingkungan Hidup (KNLH), Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri. Kebijakan ini sebagai dasar, arahan, atau acuan bagi para pemangku kebijakan dalam pelaksanaan dan pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) di Indonesia. Secara jangka panjang, kebijakan ini menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan kelestarian lingkungan hidup yang ada di Indonesia.

Kebijakan di atas tentu mengalami pembaharuan sesuai dengan perkembangan jaman. Pembaharuan pelaksanaan program Adiwiyata tertera

pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 tahun 2009 tentang pedoman pelaksanaan program Adiwiyata.

Program Adiwiyata memiliki bermacam-macam konsep, di antaranya Pendidikan Lingkungan Hidup, Sekolah Hijau (*Green School*), Sekolah Sehat, *Eco School*, dan sebagainya. Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memberikan pemahaman, kesadaran, dan mengintegrasikan nilai-nilai lingkungan hidup pada seluruh warga sekolah agar membentuk perilaku dan pola pengelolaan sekolah yang ramah lingkungan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) menjadi akses penting dalam rangkaantisipasi *global warming*, karena dengan membangkitkan rasa tanggung jawab, peduli, dan percaya diri kepada siswa untuk ikut serta dalam upaya meminimalisir pemanasan global.

Salah satu sekolah yang menyadari pentingnya pelestarian lingkungan hidup adalah SMP N 7 Yogyakarta. Hal ini terlihat dengan diimplementasikannya kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) di sekolah. Kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) yang diterapkan di SMP N 7 Yogyakarta telah dilaksanakan jauh sebelum adanya Kebijakan Pemerintah tentang Adiwiyata. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Yogyakarta menjadikan SMP N 7 Yogyakarta sebagai sekolah Adiwiyata. Hal ini

dibuktikan dengan Keputusan Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tahun 2015 Nomor 660/35 37 C.

Komitmen SMP N 7 Yogyakarta dalam melaksanakan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) terlihat dari kondisi fisik sekolah. Secara fisik, kawasan SMP N 7 Yogyakarta sangat terjaga keasriannya meskipun berada di tengah kota. Keberadaan Peraturan Pemerintah tentang Adiwiyata semakin memperkuat SMP N 7 Yogyakarta dalam menjaga dan mengembangkan konsep Pendidikan Lingkungan Hidup di sekolah. Implementasi awal dilakukan oleh sekolah melalui kerjasama dengan pemerintah. Sekolah dan pemerintah kota Yogyakarta bersama-sama melakukan kegiatan sosialisasi. Tujuan dari kegiatan ini yaitu menyemarakkan dan member semangat kepada siswa dan guru untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) tersebut.

Partisipasi seluruh warga sekolah tentu berdampak positif pada implementasi Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) di SMP N 7 Yogyakarta. Adanya partisipasi siswa, guru maupun staff SMP N 7 Yogyakarta menjadikan kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) di sekolah tersebut berjalan dengan lancar. Hal itu memberikan dampak positif yang terlihat maupun tidak terlihat. *Dampak positif yang terlihat* adalah terciptanya lingkungan di sekitar sekolah yang semakin asri. Kemudian *dampak yang tidak terlihat* adalah munculnya akmosfir pendidikan yang positif di lingkungan sekolah, seperti halnya rasa nyaman dan damai.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin mendalami aspek partisipasi siswa dalam implementasi Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) di SMP N 7 Yogyakarta. Partisipasi siswa ini yang akan menjadi subyek utama dalam penelitiannya di SMP N 7 Yogyakarta. Alasan peneliti menjadikan SMP N 7 Yogyakarta sebagai *setting* penelitian adalah keberadaan SMP N 7 Yogyakarta sebagai salah satu sekolah yang mendapatkan penghargaan Adiwiyata dan menerapkan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) di Kota Yogyakarta.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan oleh peneliti, didapatkan beberapa pokok pembahasan masalah, berikut identifikasi masalah dari latar belakang di atas:

1. Isu lingkungan menjadi fenomena paling mendunia di abad 21.
2. Pemanasan global di dunia dipercepat dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor.
3. Beberapa permasalahan lingkungan hidup di dunia mengidentifikasikan bahwa manusia merupakan pemeran utama dalam kelangsungan rusak/tidaknya lingkungan.
4. Penghijauan sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan salah satu upaya dunia dalam menghadapi kerusakan lingkungan yang perlu mendapat perhatian serta penanganan secara serius dan berkelanjutan.
5. Salah satu upaya penanganan kerusakan lingkungan dapat dilakukan melalui aspek pendidikan.

6. Salah satu kebijakan pendidikan yang relevan pada upaya pelestarian lingkungan hidup adalah Program Adiwiyata.
7. SMP N 7 Yogyakarta menjadi salah satu sekolah yang menyadari pentingnya pelestarian lingkungan hidup.
8. Partisipasi seluruh warga sekolah berdampak pada implementasi Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) di SMP N 7 Yogyakarta

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, agar pembahasan pada penelitian ini tidak terlalu melebar, maka penelitian ini lebih difokuskan pada partisipasi siswa dalam implementasi Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) di SMP N 7 Yogyakarta.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi siswa dalam implementasi Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) di SMP N 7 Yogyakarta?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat implementasi Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) di SMP N 7 Yogyakarta?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan tentang partisipasi siswa dalam implementasi Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) di SMP N 7 Yogyakarta.

2. Untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung dan menghambat implementasi Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) di SMP N 7 Yogyakarta.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis dan praktis bagi berbagai pihak.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi untuk menambah wawasan dan konsep-konsep yang berkaitan dengan kepemimpinan pendidikan di sekolah. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu pijakan atau pedoman untuk mengembangkan penelitian-penelitian yang sejenisnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Guru

- 1) Penelitian ini diharapkan memberikan informasi penting mengenai partisipasi siswa dalam implementasi Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) di SMP N 7 Yogyakarta.
- 2) Meningkatkan kesadaran guru untuk ikut berpartisipasi dalam Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) di SMP N 7 Yogyakarta.

b. Bagi Sekolah

- 1) Sebagai masukan dan bahan referensi sekolah untuk mengembangkan kebijakan melalui Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) di SMP N 7 Yogyakarta.

- 2) Sebagai pedoman untuk pengambilan kebijakan atau keputusan yang berkaitan dengan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) di SMP N 7 Yogyakarta.

c. Bagi Mahasiswa

- 1) Sebagai tambahan wawasan keilmuan di bidang Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) di sekolah.
- 2) Sebagai sarana untuk mengaplikasikan teori yang telah diperoleh dalam perkuliahan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Kebijakan Pendidikan

a. Pengertian kebijakan

Menurut Tilaar dan Riant Nugroho (2008: 185), kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah sebagai strategi untuk mewujudkan tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat pada kurun waktu tertentu. Kebijakan sebagai suatu program yang berorientasi pada pencapaian tujuan, nilai-nilai dan tindakan tindakan yang terarah berasal dari suatu lembaga pemerintahan atau organisasi.

Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat berperilaku (Dunn, 1999). Kebijakan pada umumnya bersifat *problem solving* dan proaktif. Berbeda dengan Hukum (*Law*) dan Peraturan (*Regulation*), kebijakan lebih adaptif dan *interpretative*, meskipun kebijakan juga mengatur “apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh”. Kebijakan juga diharapkan dapat bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal yang spesifik. Kebijakan harus memberi peluang diinterpretasikan sesuai kondisi spesifik yang ada.

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat

memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Kebijakan merupakan sebuah rekayasa sosial (*sosial engineering*). Sebagai sebuah rekayasa sosial, maka kebijakan dirumuskan oleh pemerintah. Tentu saja rumusan kebijakan ini secara esensial sesuai dengan permasalahan yang ada (Sudiyono, 2007: 1)

b. Pengertian kebijakan pendidikan

Kebijakan Pendidikan adalah konsep yang sering kali didengar, dilakukan, tetapi seringkali tidak dipahami sepenuhnya. Kedua kata yaitu kebijakan dan pendidikan mempunyai makna yang begitu luas dan bermacam-macam. Kebijakan pendidikan berkenaan dengan pengaturan kehidupan sesama manusia. Hal ini menunjukkan aspek sosialitas dari keberadaan manusia. Kebijakan pendidikan dilahirkan dari ilmu pendidikan sebagai ilmu praktis yaitu kesatuan antara teori dan praktik pendidikan. Oleh sebab itu kebijakan pendidikan meliputi proses analisis kebijakan, perumusan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi (Tilaar & Riant Nugroho, 2009: 16).

Kebijakan akan muncul bila dilatarbelakangi oleh suatu permasalahan termasuk didalamnya adalah kebijakan pendidikan. Permasalahan dalam pendidikan menyangkut banyak pokok permasalahan. Menurut Soetjipto (2009: 202), masalah yang dihadapi bangsa Indonesia mencakup lima pokok permasalahan, yaitu: Masalah

pemerataan pendidikan, masalah daya tampung pendidikan, masalah relevansi pendidikan, masalah kualitas pendidikan, dan masalah efisiensi-efektivitas pendidikan.

H.A.R Tilaar & Riant Nugroho (2009: 140) menyebutkan bahwa kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses serta hasil dari perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dapat dijabarkan. Dari visi misi pendidikan, dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu.

Arif Rohman (2009: 108) mengatakan kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan negara atau kebijakan publik pada umumnya yang mengatur khususnya regulasi yang berkaitan dengan penyerapan sumber, alokasi dan distribusi sumber, serta pengaturan perilaku dalam pendidikan.

Dari pengertian diatas dapat dilihat aspek-aspek yang tercakup dalam kebijakan pendidikan antara lain sebagai berikut:

- 1) Kebijakan pendidikan merupakan lahir dari ilmu pendidikan sebagai makhluk yang menjadi manusia dalam lingkungan manusia dan proses pendidikan merupakan pemanusiaan yang terjadi dalam lingkungan alam serta lingkungan sosial.
- 2) Kebijakan pendidikan lahir dari ilmu pendidikan sebagai ilmu yang ilmu yang praksis yaitu kesatuan antara teori dan praktik

pendidikan. Oleh karena itu kebijakan pendidikan meliputi dari proses analisis kebijakan perumusan, serta evaluasi.

- 3) Kebijakan pendidikan haruslah mempunyai suatu validitas dalam perkembangan pribadi serta masyarakat yang memiliki pendidikan itu. Suatu kebijakan pendidikan yang menghalangi kemerdekaan pribadi berarti telah merampas has asasi manusia sehingga pada hakekatnya merupakan anti pendidikan. Sedangkan, kebijakan pendidikan yang tidak menghargai aspek sosial manusia berarti telah mengisoalsikan mansuai hidup dari hidup bersama yang merupakan kondisi dalam proses pemanusiaan (H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho, 2009: 141)

Sehingga dapat dikatakan, kebijakan pendidikan merupakan suatu langkah-lagkah stretegis serta dalam rangka mewujudkan tujaun pendidikan dalam suatu masyarakat. Berdasarkan bebrapa pengertian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan pendidikan merupakan sebuah rumusan yang dilakukan melalui proses dan tahapan tertentu untuk menyelsaikan suatu permasalahan dalam pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan bersama. Kebijakan yag akan dilihat dalam pendidikan adalah terkait dengan partisipasi siswa dalam implementasi kebijakan pendidikan lingkungan hidup di SMP Negeri 7 Yogyakarta.

c. Tahap-tahap pembuatan kebijakan pendidikan

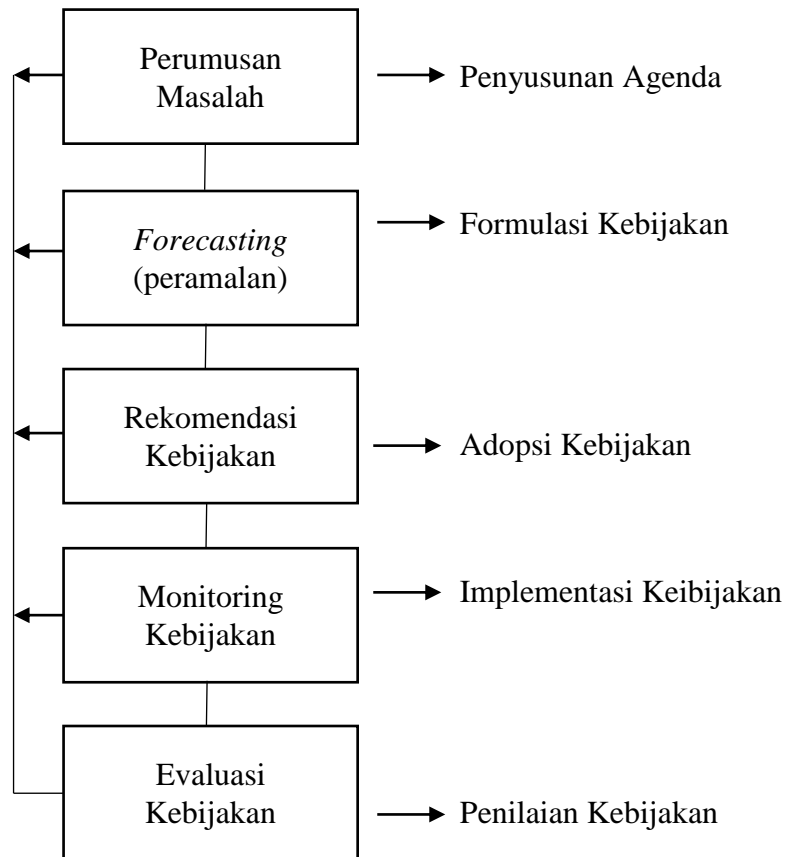
- 1) **Penyusunan Agenda.** Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam pembuatan sebuah kebijakan.

Dalam penyusunan agenda juga sangat penting untuk menentukan isu public yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Isu kebijakan biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut. Menurut William Dunn (1999), isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjeasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi agenda kebijakan.

- 2) **Formulasi kebijakan.** Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.
- 3) **Adopsi/legitimasi kebijakan.** Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Memberikan alternatif kebijakan yang paling unggul dibandingkan dengan alternatif kebijakan yang lain. Dalam proses pemilihan alternatif

tersebut harus mendasarkan pada seperangkat kriteria yang jelas dan transparan, sehingga ada alasan yang masuk akal bahwa suatu alternative kebijakan dipilih atau ditolak.

- 4) **Implementasi kebijakan.** Kebijakan yang sudah direkomendasikan untuk dipilih *policy maker* bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Ada banyak variasi yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya *policy maker* untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran.
- 5) **Evaluasi/penilaian kebijakan.** Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.



Gambar 1. Tahap Kebijakan

Sumber: William N. Dunn dalam Subarsono (2005: 9)

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu “Partisipasi Siswa Dalam Implementasi Pendidikan Lingkungan Hidup di SMP Negeri 7 Yogyakarta” berada dalam tahapan ke 4 yaitu implmentasi kebijakan.

2. Implementasi Kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup

a. Implementasi kebijakan pendidikan

Kebijakan publik memiliki tiga komponen dasar yang melekat, yaitu tujuan yang luas, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran. Komponen *cara mencapai sasaran* harus diterjemahkan oleh

birokrat menjadi program-program aksi dan proyek yang di dalamnya ada cara, di mana terkandung siapa pelaksana atau implementornya, berapa besar dan dari mana dana diperoleh, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dilaksanakan atau bagaimana sistem managemennya, dan bagaimana keberhasilan atau kinerja kebijakan diukur. Cara dalam komponen dasar yang ke tiga juga merupakan komponen yang berfungsi untuk mewujudkan komponen tujuan dan sasaran khusus. Cara di sini bisa disebut implementasi.

Fungsi implementasi menurut Sri (2011) adalah membentuk suatu upaya yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai outcome atau hasil dari kegiatan pemerintah. Implementasi sebenarnya menyangkut kreativitas dari pelaksana kebijakan untuk merancang dan menemukan alat-alat khusus untuk mencapai tujuan. Hal ini karena kebijakan negara pada umumnya masih berupa pernyataan pernyataan umum tentang tujuan, sasaran, dan berbagai macam sarana yang masih harus dijabarkan kedalam program-program yang lebih rasional yang selanjutnya dijabarkan lagi ke dalam proyek-proyek.

Dwijowijoto (dalam Syafaruddin, 2008), menyebutkan bahwa implementasi kebijakan didefinisikan juga sebagai cara yang dilaksanakan agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Berbeda dengan Putt dan Springer dalam Syafaruddin (2002), implementasi kebijakan didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas

dan keputusan yang memudahkan pernyataan kebijakan dalam formulasi yang terwujud dalam praktik organisasi.

Mazmania dan Sabatier dalam Eddi (2006) memberikan beberapa langkah untuk menyusun program yaitu:

- 1) Mengidentifikasi masalah yang harus diintervensi
- 2) Menegaskan tujuan yang hendak dicapai
- 3) Merancang struktur proses implementasi

Grindle dalam Samodra (2006) mengatakan bahwa program harus disusun dengan jelas dan jika tetap masih bersifat umum program harus diterjemahkan secara lebih operasional menjadi proyek. Menurut Grindle kejelasan program diperlukan untuk memeriksa dan mengevaluasi tindakan administrasi yang dilakukan birokrasi guna mentransformasi kebijakan menjadi kegiatan nyata.

Secara etimologi kebijakan merupakan terjemahan dari kata *policy*. Poerwadarminta menyatakan bahwa kebijakan berasal dari kata bijak yang artinya pandai, mahir dan selalu menggunakan akal budi. Dengan demikian kebijakan adalah kepandaian/kemahiran (Rusdiana, 2015).

Donovan dan Jackson dalam Keban (2014: 55) menjelaskan bahwa *policy* (kebijakan) dapat dilihat secara filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses dan sebagai kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan; sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai

serangkaian kesimpulan atau rekomendasi; sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya dan sebagai kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.

Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan keputusan. Kebijakan senantiasa berorientasi kepada masalah (*problem-oriented*) dan juga berorientasi kepada tindakan (*action-oriented*), sehingga dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan (Suharto, 2006).

Anderson dalam Wahab (2008: 2), memberikan rumusan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pendapat yang lain adalah dari Carl Friedrich dalam Wahab (2008: 2) yang menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

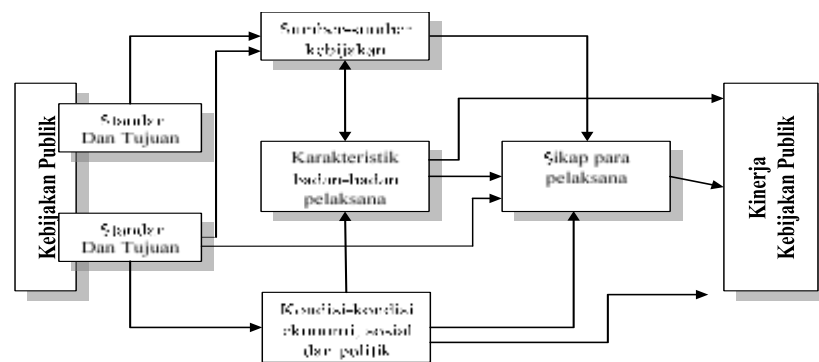
Agustino (2008: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Dari beberapa pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hakekatnya studi tentang *policy* (kebijakan) mencakup pertanyaan: *what, why, who, where*, dan *how*. Semua pertanyaan itu menyangkut tentang masalah yang dihadapi lembaga-lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut; isi, cara atau prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan.

b. Teori implementasi kebijakan pendidikan

Berdasarkan pengertian implementasi di atas Van Meter dan Vanhorn mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi yang disebut dengan *A Model of The Policy Implementation*, yaitu:

- 1) Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan;
- 2) Sumber-sumber kebijakan;
- 3) Karakteristik badan-badan pelaksana;
- 4) Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik;
- 5) Sikap para pelaksana; dan
- 6) Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.



(Sumber: Meter dan Van Horn, 1975)

Gambar 2. *Model The Implementation Process (Meter dan Vanhorn, 1975:462-478).*

Proses ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu kebijakan yang pada dasarnya dilakukan untuk meraih kinerja implentasi kebijakan publik yang tinggi, yang berlangsung dala hubungan berbagai variabel.

Model ini mengumpamakan implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. *Pertama*, ukuran dan tujuan kebijakan diperlukan untuk mengarahkan dalam melaksanakan kebijakan, hal

tersebut dilakukan agar sesuai dengan program yang sudah direncanakan. Ukuran kebijakan SISMS Gateway yang menjadi sasaran adanya kepuasan pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat dan adanya kemudahan dalam pembuatan laporan masyarakat dalam keadaan darurat dengan menggunakan teknologi yang tepat guna.

Kebijakan SISMS Gateway bertujuan untuk membangun data base yang bersifat nasional berguna dalam mewujudkan optimalisasi proses dan peningkatan kualitas layanan dari institusi pelayanan keamanan masyarakat di Kota Bandung, serta melakukan korelasi data untuk menghasilkan data baru hasil korelasi kebijakan diimplementasikan harus secara jelas sesuai dengan tujuannya, kebijakan apa yang akan ditetapkan sebagai sistem yang akan dilaksanakan oleh unit-unit pelayanan masyarakat.

Kedua, menurut Van Meter dan Vanhorn, sumber daya kebijakan merupakan keberhasilan proses implementasi kebijakan yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu (Meter dan Vanhorn, 1975: 465). Sumber-sumber kebijakan tersebut sangat diperlukan untuk keberhasilan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Sumber daya manusia sangat penting karena sebagai sumber penggerak dan pelaksana kebijakan, modal diperlukan untuk kelancaran pembiayaan kebijakan agar tidak menghambat proses kebijakan. Waktu merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan

kebijakan, karena waktu sebagai pendukung keberhasilan kebijakan. Sumber daya waktu merupakan penentu pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan.

Ketiga, keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari sifat atau ciri-ciri badan/instansi pelaksana kebijakan. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para badan atau instansi pelaksananya.

Subarsono mengungkapkan kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri dari para aktor, kualitas tersebut adalah tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja, dan integritas moralnya (Subarsono, 2006: 7). Komponen dari model ini terdiri dari struktur-struktur formal dari organisasi-organisasi dan atribut-atribut yang tidak formal dari personil mereka, disamping itu perhatian juga perlu ditujukan kepada ikatan-ikatan badan pelaksana dengan pameran-pameran serta dalam penyampaian kebijakan.

Keempat, dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian yang besar selama dasawarsa yang lalu. Van Meter dan Vanhorn mengungkapkan:

“Sejauh mana lingkungan eksternal ikut mendukung keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan, lingkungan eksternal tersebut adalah ekonomi, sosial, dan politik dukungan sumber daya ekonomi dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan dan dalam lingkungan politik dukungan

elite politik sangat diperlukan dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan” (Meter dan Vanhorn, 1975: 471).

Perubahan kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi interpretasi terhadap masalah dan dengan demikian akan mempengaruhi cara pelaksanaan program, variasi-variasi dalam situasi politik berpengaruh terhadap pelaksanaan kerja. Peralihan pemerintahan dapat mengakibatkan perubahan-perubahan dalam cara pelaksanaan kebijakan-kebijakan tanpa mengubah kebijakan itu sendiri.

Kelima, Van Meter dan Vanhorn mengungkapkan bahwa karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi (Meter dan Vanhorn, 1975: 472). Sikap para pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai pelaksana kebijakan harus dilandasi dengan sikap disiplin. Hal tersebut dilakukan karena dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, setiap badan/instansi pelaksana kebijakan harus merasa memiliki terhadap tugasnya masing-masing berdasarkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Keenam, Van Meter dan Vanhorn mengungkapkan bahwa komunikasi memegang peranan penting bagi berlangsungnya koordinasi implementasi kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki efek tidak langsung pada kinerja, apa pengaruh ini terhadap variabel dependen ditengahi oleh variabel independen lain. Jelas yang

memberikan pelayanan publik akan dipengaruhi oleh cara yang standar dan tujuan komunikasi untuk pelaksana dan sejauh mana standards dan tujuan memfasilitasi pengawasan dan penegakan hukum (Meter dan Vanhorn, 1975: 473). Standar dan tujuan tidak langsung berdampak pada disposisi pelaksana melalui kegiatan komunikasi interorganisasi.

Hubungan antara sumber daya dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik dari yurisdiksi menerapkan (atau organisasi) menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya fiskal dan lainnya dapat menciptakan permintaan oleh warga negara swasta dan terorganisir kelompok-kelompok kepentingan-untuk partisipasi dalam dan implementasi berhasil dari program (Meter dan Vanhorn, 1975: 476). Prospek manfaat dari program ini dapat menyebabkan kelompok dinyatakan diam untuk menekan partisipasi maksimum. Berdasarkan sumber daya terbatas yang tersedia, warga negara kepentingan pribadi dan terorganisir dapat memilih untuk menentang kebijakan atas dasar bahwa manfaat dari partisipasi sedikit dibandingkan dengan biaya potensial.

c. Kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup

Kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan Menteri Pendidikan Nasional No.03/MenLH/02/2010, No.01/II/KB/2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang Pendidikan Lingkungan Hidup melalui program Adiwiyata bisa diartikan bahwa badan-badan dan aparat pemerintah dalam bidang

tertentu bisa melakukan kesepakatan bersama untuk menetapkan sebuah kebijakan publik.

Kajian kebijakan publik dalam pendidikan menurut Syafaruddin (2008) tidak dapat dilepaskan dari persoalan yang kini dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia, adalah bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan menurut Syafaruddin akan meningkat apabila negara mampu melahirkan kebijakan pendidikan yang akurat, kebijakan pendidikan yang berkelanjutan. Kualitas pendidikan umumnya dikaitkan dengan tinggi rendahnya prestasi yang ditunjukkan dengan kemampuan siswa mencapai skor dalam tes, kemampuan lulusan mendapatkan dan melaksanakan pekerjaan dengan memiliki kualitas perilaku ramah lingkungan. Kualitas pendidikan ini dianggap penting karena sangat menentukan gerak laju pembangunan di negara manapun juga. Oleh karenanya, hampir semua negara di dunia menghadapi tantangan untuk melaksanakan pembaharuan pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

P.J.Hills yang diringkas oleh Riant Nugroho (2008) menyatakan bahwa pendidikan bukan lagi menjadi urusan masyarakat tradisional, melainkan dalam masyarakat yang modern pendidikan telah menjadi komoditas penting dalam panggung politik, bahkan untuk menjadi pemenang politik mereka sering mengusung isu penting pendidikan untuk kepentingan partai mereka. Kesuksesan pendidikan

modern di era industrialisasi menurut Syafaruddin (2008) didukung oleh kebijakan pendidikan yang mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat. Tilaar dan Riant (2009) mengutarakan bahwa kemajuan suatu bangsa tidak terlepas dari upaya untuk mengembangkan prinsip hidup berdemokrasi seperti yang dilaksanakan oleh Negara India. Menurut pemenang Nobel ekonomi tahun 1999 Amartya Sen menunjuk dengan jelas kaitan antara tingkat pendidikan suatu bangsa dengan tingkat kemiskinan dan kehidupan demokratis.

Pendidikan menjadi tugas bersama didalam masyarakat, sehingga muncul lembaga-lembaga pendidikan yang bernama sekolah atau pusat-pusat pelatihan yang proses pendidikannya dapat berjalan secara formal. Untuk mencapai tujuan pendidikan didalam melaksanakan pendidikan tersebut diperlukan pengaturan-pengaturan tertentu sehingga tujuan pendidikan yang diharapkan oleh stakeholder lembaga pendidikan itu dapat tercapai. Pengaturan-pengaturan tertentu tersebut dikenal dengan kebijakan pendidikan (Tilaar dan Riant, 2009). Selanjutnya mereka juga menjelaskan pentingnya kebijakan pendidikan karena kebijakan pendidikan selalu berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan besar yang menyangkut pengaturan kehidupan dengan sesama manusia seperti apakah manusia itu atau apakah hakikat manusia itu. Selanjutnya jawaban terhadap hakikat manusia akan membawa kita ke pertanyaan apakah sebenarnya tujuan hidup manusia di dunia ini dan bagaimana manusia itu dapat mewujudkan tujuan

tersebut. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah sebenarnya proses pendidikan itu? Pengertian yang tepat mengenai hakikat proses pendidikan itu akan melahirkan berbagai kebijakan pendidikan. Kekosongan pengertian mengenai proses pendidikan akan menghasilkan kekeliruan-kekeliruan yang fatal berkaitan dengan perkembangan kehidupan manusia sendiri.

Proses pendidikan sendiri terkait erat dengan kekuasaan. Seperti sekeping uang logam pendidikan tidak dapat dilepaskan dari kekuasaan. Tidak seluruh kekuasaan itu memiliki sifat yang negatif, bahkan Tiaar dan Nugroho mengatakan tanpa kekuasaan tidak mungkin ada proses pendidikan. Namun mereka berdua juga menggarisbawahi bahwa kekuasaan yang terus-menerus tanpa batas merupakan suatu pemberangusan terhadap hakikat manusia sebagai makhluk merdeka, sehingga manusia itu menjadi tidak berdaya karena telah dirampas hak-hak asasinya sebagai manusia.

Kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan Menteri Pendidikan Nasional 45 No.03/MenLH/02/2010, No.01/II/KB/2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang Pendidikan Lingkungan Hidup melalui program Adiwiyata akan melahirkan perubahan yang radikal tentang pembangunan yang berkelanjutan dan melahirkan manusia manusia yang peduli lingkungan apapun profesinya. Kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup menurut penulis juga merupakan sebuah bukti sisi positif dari

proses politik dalam kebijakan dunia pendidikan. Dari kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup penulis bisa melihat bagaimana hubungan masyarakat dan pemerintah dimana pemerintah memang memiliki kekuatan dan kemampuan secara paksa melalui program Adiwiyata menanamkan nilai-nilai peduli lingkungan melalui jalur pendidikan.

Berdasarkan pendapat tersebut, kebijakan pada dasarnya suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan tertentu dan bukan hanya sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu. Kebijakan seyogyanya diarahkan pada apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah. Implementasi suatu kebijakan adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, tetapi kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi masih tetap ada karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumbernya.

3. Partisipasi

a. Definisi partisipasi

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *participation* adalah pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Partisipasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan (Depdiknas, 2005: 831).

Mardikanto (2013: 10) menyatakan bahwa partisipasi merupakan keadaan masyarakat yang berperan secara aktif dalam proses atau alur terhadap program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan dengan sumbangan tenaga, pikiran atau dalam bentuk materiil. Adisendjaja dalam Hidayati (2013: 150) menyatakan bahwa partisipasi merupakan pemberian motivasi kepada setiap individu untuk berperan serta secara aktif dalam pemecahan masalah lingkungan.

Partisipasi merupakan komunitas sekolah terlibat dalam manajemen sekolah yang meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sesuai tanggung jawab peran (Kementrian Lingkungan Hidup. 2013: 4). Lebih jauh lagi, Ropke (dalam Oktavia, 2013) menjelaskan mengklasifikasikan partisipasi menjadi tiga bentuk:

- 1) Partisipasi dalam menggerakkan atau berkontribusi sumberdaya
- 2) Partisipasi dalam mengambil keputusan (perencanaan, implementasi atau pelaksanaan dan evaluasi)
- 3) Partisipasi anggota dalam menikmati manfaat

Pedapat selanjutnya disampaikan oleh Djatmika (dalam Oktavia, 2013), menyebutkan bahwa partisipasi seseorang dapat diperinci menjadi:

- 1) Seseorang berpartisipasi dalam memberikan kontribusi atau memberikan sumberdaya
- 2) Seseorang berpartisipasi dalam mengambil keputusan
- 3) Seseorang berpartisipasi dalam mengambil keuntungan.

Berdasarkan beberapa penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi merupakan suatu tindakan oleh seseorang atau sekelompok orang yang melibatkan dirinya dalam suatu proses kegiatan atau program. Partisipasi tersebut dapat berupa tenaga, pikiran maupun materill dalam hal memberikan keputusan maupun memberikan kontribusi. Partisipasi disini merupakan keterlibatan siswa dalam Program Adiwiyata di sekolah dan di lingkungan luar sekolah atau rumah.

b. Prinsip-prinsip partisipasi

Partisipasi dibangun atas dasar prinsip-prinsip sebagai berikut (Wahyudin Sumpena, 2004: 60):

- 1) **Kebersamaan.** Partisipasi tumbuh melalui konsensus dan kebersamaan visi, cita-cita, harapan, tujuan, dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Proses pengaturan yang terjadi dalam masyarakat akan tumbuh melalui kebersamaan rencana, pengorganisasian, dan pengendalian program.

2) **Tumbuh dari bawah.** Partisipasi bukan merupakan suatu yang dipaksakan dari atas kebawah *top down* atau dikendalikan oleh individu atau kelompok melalui mekanisme kekuasaan. Partisipasi tumbuh berdasarkan kesadaran dan kebutuhan yang dirasakan. Partisipasi merupakan proses pelebagaan yang bersifat "*bottom up*", dimana berbagai penagalaman yang terjadi dijadikan masukan dalam pengembangan program.

3) **Kepercayaan dan keterbukaan.** Kunci sukses partisipasi adalah menumbuhkan dan membangun hubungan atas dasar saling percaya dan keterbukaan. Mikkelsen (1999: 64) membagi partisipasi menjadi 6 (enam) pengertian, yaitu:

- a) Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat yang dalam hal ini adalah warga sekolah kepada proyek yang sedang dijalankan di sekolah tanpa ikut serta pengambilan keputusan;
- b) Partisipasi adalah pemekaan pihak masyarakat dalam hal ini warga sekolah untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan dalam sekolah;
- c) Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam hal ini adalah warga sekolah terutama guru dalam perubahan yang ditetukannya sendiri;
- d) Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil

inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu;

- e) Partisipasi adalah pematapan dialog antara warga sekolah dengan para staff yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks local, dan dampak-dampak yang akan terjadi;
- f) Partisipasi adalah keterlibatan warga sekolah baik itu kepala sekolah guru, peserta didik dan karyawan dalam pembangunan, kehidupan, dan lingkungan sekolah mereka;

c. Tujuan partisipasi

Tujuan utama partisipasi adalah untuk: (1) meningkatkan dedikasi atau kontribusi guru sebagai salah satu *stakeholders* terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah, baik dalam bentuk jasa (pemikiran, intelektualitas dan keterampilan), moral, finansial, dan material atau barang; (2) memberdayakan kemampuan yang ada pada *stakeholders* dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, baik sebagai *advisor, supporter, mediator, controller, resource linker, and education provider*, dan (4) menjamin agar setiap keputusan dan kebijakan yang diambil benar benar mencerminkan aspirasi *stakeholders* dan menjadikan aspirasi *stakeholders* sebagai panglima bagi penyelenggaraan pendidikan di sekolah (Wikipedia.com).

d. Macam-macam partisipasi

Cohen dan Uphoff dalam Siti Irene (2011: 61) membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. Dan keempat, partisipasi dalam evaluasi.

Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi dalam pengambilan keputusan ini terutama berkaitan dengan penentuan *alternative* dengan masyarakat untuk menuju kata sepakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi dalam hal pengambilan keputusan sangat penting, karena masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan prioritas pembangunan. Cohen dan Uphoff (Siti Irene, 2011: 61) menyebutkan bahwa wujud dari partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini bermacam-macam, dalam hal ini masyarakat sekolah atau warga sekolah seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Dengan demikian partisipasi masyarakat atau warga sekolah merupakan suatu proses pemilihan alternative berdasarkan pertimbangan yang menyeluruh dan rasional serta ikut andil menyumbangkan pikiran guna kemajuan sekolah.

Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan lanjutan dari rencana yang

telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan. Di dalam pelaksanaan program, sangat dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur, khususnya pemerintah dalam kedudukannya sebagai focus atau sumber utama pembangunan. Menurut Ndraha dan Cohen dan Uphoff (dalam Siti Irene, 2011: 62) ruang lingkup partisipasi dalam pelaksanaan suatu program meliputi: pertama, menggerakkan sumber daya dan dana. Kedua, kegiatan administrasi dan koordinasi dan ketiga, penjabaran program. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi pelaksanaan suatu program merupakan satu unsur penentu keberhasilan itu sendiri.

Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bias dicapai. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari seberapa besar persentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau da penyimpangan.

e. Indikator keberhasilan partisipasi

Keberhasilan peningkatan partisipasi pelaku pendidikan dalam hal ini warga sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah dapat diukur dengan beberapa indikator berikut: (1) Kontribusi atau dedikasi warga sekolah meningkat dalam hal jasa (pemikiran, keterampilan), finansial, moral, dan material atau barang; (2) Meningkatnya kepercayaan warga sekolah kepada sekolah, terutama menyangkut kewibawaan dan kebersihan; (3) Meningkatnya tanggungjawab warga sekolah terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah; (4) Meningkatnya kualitas dan kuantitas masukan (kritik dan saran) untuk peningkatan mutu pendidikan; (5) Meningkatnya kepedulian warga sekolah terhadap setiap langkah yang dilakukan oleh sekolah untuk meningkatkan mutu; (6) Keputusan-keputusan yang dibuat oleh sekolah benar-benar mengekspresikan aspirasi dan pendapat warga sekolah dan mampu meningkatkan kualitas pendidikan.

f. Hierarki partisipasi

Pelaksanaan partisipasi dapat tergambar dalam tangga partisipasi. Praktik partisipasi sebagai hak politik memerlukan keterlibatan langsung dari warga dalam pembuatan kebijakan publik sehingga terjalin sinergi antara warga, pemerintah dan masyarakat dalam membangun kepercayaan publik. Sherry Arstein (Siti Irene A.D.,

2011: 64) menjelaskan peran serta/ partisipasi masyarakat dalam tangga partisipasi sebagai berikut:

Tabel 1. Tangga Partisipasi menurut Shery Arstein

Klasifikasi	Uraian	Tingkatan
<i>I. Citizen Power</i>	Pada tahap ini sudah terjadi pembagian hak, tanggung jawab, dan wewenang antara masyarakat dengan pemerintah dalam pengambilan keputusan	Kontrol masyarakat (<i>citizen control</i>) Pelimpahan kekuasaan (<i>delegated control</i>) Kemitraan (<i>partnership</i>)
<i>II. Tokenisme</i>	Hanya sekedar formalitas yang memungkinkan masyarakat mendengar dan memiliki hak untuk memberikan suara, tetapi pendapat mereka belum menjadi bahan dalam pengambilan keputusan	Penentruman (<i>placation</i>) Konsultasi (<i>consultation</i>) Informasi (<i>information</i>)
<i>III. Non Participation</i>	Masyarakat hanya dijadikan objek	Terapi (<i>therapy</i>) Manipulasi (<i>manipulation</i>)

Dalam kaitannya dengan sekolah, pelaksanaan keterlibatan orang tua siswa dapat digambarkan dalam hirarki sebagai berikut (Siti Irene A.D., 73-75):

Tabel 2. Hierarki Partisipasi

Level	Deskripsi
I. <i>Spectator</i>	Menunjukkan keterlibatan orangtua di sekolah sangat kecil bisa dikatakan tidak ada. orang tua merasakan bahwa sekolah dan guru merupakan sebuah kekuasaan yang otonom sehingga tidak menginginkan campur tangan orang tua. Pintu sekolah dipandang oleh orang tua sebagai penghalang untuk berprestasi. Aktivitas yang menuntut partisipasi orang tua dilakukan di luar sekolah. Peran orang tua sangat terbatas. Komunikasi antara guru dan orang tua, baik melalui surat kabar atau telepon sangat jarang terjadi. Bentuk komunikasi terjadi hanya bila orang tua mempunyai keluhan atau penolakan terhadap informasi yang diterima mengenai anaknya. Bahkan lebih buruk dari itu, orang tua

	memperlihatkan reaksi yang berlebihan terhadap prestasi buruk yang dicapai oleh anak dengan mengkritik sekolah secara terbuka, menghukum anak atau bahkan melukai secara fisik.
II. <i>Support</i>	Menunjukkan keterlibatan orang tua di sekolah hanya pada saat khusus dimana pihak sekolah meminta keterlibatan mereka. Tugas yang dibebankan kepada orang tua biasanya dapat diselesaikan di rumah dan tidak menuntut waktu dan energi. Sebagai contoh, orang tua ke sekolah untuk memastikan bahwa anaknya hadir, orang tua memaksa pekerjaan rumah anak. Selain itu, orang tua siswa biasanya menyumbang bagi sekolah, membayar iuran kelompok orang tua-guru, dan lain-lain.
III. <i>Engagement</i>	Hubungan orang tua dan sekolah saling menghormati dalam suasana saling mendukung. Keterlibatan orang tua di sekolah berdasarkan dua kebutuhan umum, yaitu 1) mengamati sekolah dan pengaruhnya terhadap anak, 2) agar partisipasinya disaksikan oleh anak. Pihak sekolah mengharapkan orang tua dapat: 1) mengembangkan dan mendistribusikan sumber informasi untuk sekolah dan masyarakat. 2) bekerja sebagai 'volunteer' dan atau sebagai nara sumber untuk membagi pengetahuan, keterampilan, dan bakat khusus kepada para siswa. Guru dapat meminta orang tua siswa untuk menyediakan sarana transportasi dan menemani siswa pada kunjungan studi lapangan. Bahkan di kelas, orang tua dapat membimbing siswa dan membawa siswa pada kegiatan akademis di bawah pengawasan guru. Keterlibatan orang tua sejalan dengan harapan untuk mengetahui pengalaman anak di sekolah serta pengalaman anak-anak lain, orang tua menyadari bahwa fungsi sekolah tidak hanya menyediakan keterampilan sebagai bekal kerja tetapi sekolah juga berfungsi memberi bekal agar memiliki keterampilan hidup yang berkualitas.
IV. <i>Decision Making</i>	Orang tua menuntut hubungan yang saling tergantung antara rumah dan sekolah. Pada tingkat ini kekuatan sekolah diperoleh melalui jaringan yang dimiliki orang tua. Aktivitas orang tua pada tingkat ini adalah secara konsisten mempengaruhi pengambilan keputusan. Orang tua bertanggungjawab pada setiap aspek sekolah.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat digolongkan bahwa dalam penelitian ini masuk kedalam hierarki ketiga yaitu *Engagement* dan dapat disimpulkan keaktifan partisipasi siswa didapat dari indicator sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kontribusi
- 2) Meningkatnya kepercayaan
- 3) Meningkatnya tanggungjawab
- 4) Meningkatnya kualitas dan kuantitas
- 5) Meningkatnya kepedulian
- 6) Ekspresi dari aspirasinya

4. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia (Salim, 1983:34). Di dalam undang-undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Undang-undang Nomor 32 tahun 2009), pengertian tentang lingkungan hidup adalah "kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain".

Petak dalam (Hamzah, 2013:23) memaparkan bahwa pengelolaan lingkungan sebagai upaya mengelola hal-hal yang berkenaan dengan kehidupan manusia sehingga dapat mencapai suatu keseimbangan yang

dapat diterima antara kualitas lingkungan manusia dan kualitas lingkungan alam. Pengertian pengelolaan lingkungan tersebut memberikan pemahaman bahwa pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya menyangkut tentang pemanfaatan lingkungan hidup, tetapi juga bagaimana upaya pengelolaan lingkungan hidup tersebut dapat tetap melestarikan fungsi-fungsi lingkungan dengan baik. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara hemat penggunaan energi listrik, kertas, BBM, mengurangi aktivitas yang menghasilkan sampah, membangun kebiasaan menanam pohon atau berkebun, membuat kompos dari daun-daun kering, memilah sampah berdasarkan jenisnya, membuang sampah pada tempatnya dan menghindari memusnahkan sampah dengan cara dibakar.

Manusia dalam melakukan aktivitasnya, terkadang tidak dibarengi dengan perilaku-perilaku yang terpuji yang menunjukkan kepedulian terhadap orang lain dan lingkungannya. Rasa simpati dan empati seakan tergerus dengan kebutuhan dan kesenangan yang ingin dicapainya. Hal ini berarti bahwa fokus perhatian haruslah ditunjukkan pada manusia, khususnya yang menyangkut pembentukan sikap dan perilakunya.

Sementara itu, sikap dan perilaku bukanlah talenta bawaan individu, tetapi merupakan hasil bentukan manusia dan lingkungan tempat ia hidup dan dibesarkan. Pendidikan merupakan hal yang memungkinkan untuk membentuk mental dan perilaku individu selaku manusia seperti yang diharapkan. Hal ini karena manusia adalah makhluk yang berbudaya dalam arti memiliki kemampuan berikir dan berkreasi guna meningkatkan

kualitas kehidupannya. Maka, apabila pendidikan dipahami sebagai usaha sadar untuk membentuk sikap dan perilaku manusia, pendidikan lingkungan hidup harus dipahami sebagai upaya untuk menggiring individu kearah perubahan gaya hidup dan perilaku yang ramah lingkungan. Perilaku tersebut dibentuk dari lingkungan sekolah sehingga diharapkan dapat diterapkan oleh siswa dalam partisipasinya pada pengelolaan lingkungan tempat tinggal.

Konferensi Tbilisi 1977 merinci tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan lingkungan hidup, meliputi aspek: 1) Pengetahuan, untuk membentuk peserta didik memperoleh pemahaman dasar tentang lingkungan hidup secara keseluruhan dan masalah-masalah yang berhubungan dengannya, 2) Sikap, untuk membantu peserta didik memperoleh seperangkat nilai-nilai dan sikap peduli terhadap lingkungan hidup serta motivasi untuk berpartisipasi secara aktif dalam memperbaiki dan melindungi lingkungan hidup, 3) Kepedulian, untuk membantu peserta didik mengembangkan kepedulian dan sensitivitas terhadap lingkungan hidup secara keseluruhan dan masalah-masalah didalamnya, 4) Keterampilan, untuk membantu peserta didik memperoleh keterampilan dalam mengidentifikasi, menyelidiki, dan memecahkan masalah-masalah lingkungan hidup, dan 5) Partisipasi, untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik secara aktif memasuki semua jenjang pekerjaan pada masa datang yang berkenaan dengan masalah-masalah lingkungan hidup (Hamzah, 2013: 48).

Selama ini kegiatan-kegiatan yang harus diikuti oleh siswa, diantaranya yaitu mengikuti pembelajaran tentang lingkungan hidup. Dalam kegiatan ini, pendidikan lingkungan hidup diintegrasikan dengan semua mata pelajaran. Kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan hidup yang diterapkan dalam banyak kegiatan, misalnya pemanfaatan fasilitas lingkungan sebagai media pembelajaran.

Semua masyarakat memiliki hak, kewajiban dan peran yang sama dalam pengelolaan lingkungan hidup. Termasuk siswa yang ada di setiap sekolah formal. Makhluk lain seperti hewan-hewan maupun tumbuhan di lingkungan harus tetap terjaga karena mereka tetap diperlukan eksistensinya untuk keberlangsungan keseimbangan lingkungan hidup. Hal ini dikarenakan manusia dan tumbuhan serta hewan saling bergantung antara satu dengan lainnya. Kegiatan pengelolaan lingkungan dapat dilakukan dengan mengelola lingkungan tempat tinggalnya.

Agung (2011) menyatakan bahwa berbagai cara sederhana bisa dilakukan bersama anak dan keluarga di rumah dalam berperilaku ramah terhadap lingkungan dalam rangka pengelolaan lingkungan, cara tersebut adalah:

Hemat energi. Mawardi dkk. (2011: 34) menyatakan ada beberapa perilaku ramah lingkungan yang dapat dikembangkan dalam anggota keluarga, salah satunya adalah dengan gerakan hemat listrik. Salah satu gerakan hemat listrik ini dapat diterapkan dengan cara tidak membiarkan alat elektronik (televisi) menyala 19 ketika tidak ditonton. Bararah (2012)

menambahkan bawah waktu menonton televisi untuk remaja hingga usia 18 tahun hanya boleh maksimal 2 jam setiap hari. Hal ini untuk mengurangi gaya hidup tidak sehat yang terkait dengan diabetes dan penyakit jantung. Selain itu dapat menghemat listrik.

Membawa sendiri tas belanja saat berbelanja untuk menghindari penggunaan plastik. Fajri (2011) memaparkan, membawa wadah makanan dan tas belanja sendiri saat berbelanja, akan berkontribusi untuk mengurangi sampah plastik. Kita akan dapat mengurangi kantong kresek yang hanya bisa terurai 12 tahun, plastik air mineral kemasan yang terurai dalam 20 tahun, atau bahkan kantong kertas yang terurai 2-6 bulan setelah dipakai.

Membangun kebiasaan menanam pohon atau berkebun. Memanfaatkan setiap jengkal tanah di halaman rumah dengan berbagai tanaman, karena keberadaan tanaman selain sangat penting dan berfungsi sebagai penghasil oksigen, menyerap CO₂, penyimpanan air, peneduh dari panas matahari, penghalang angin, juga dapat menghasilkan buah/bunga untuk memenuhi pangan dan menambah ekonomi keluarga. Maka mulailah menanam pekarangan rumah dengan menanam pohon pelindung (seperti pohon mangga, jeruk, dan sebagainya), tanaman obat maupun tanaman hias (Mawardi., dkk, 2011: 32-33).

Mengurangi aktivitas yang menghasilkan sampah. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan membudayakan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse dan recycle. Selain itu, hindari penggunaan barang yang bersifat disposable

(hanya digunakan satu kali). Yuliandari (2014) menambahkan bahwa 20 kerusakan lingkungan dapat kita cegah dengan gaya hidup ramah lingkungan dalam mengelola lingkungan rumah.

Mengurangi penggunaan BBM. Membatasi penggunaan BBM dapat kita lakukan dengan berbagai cara, misalnya tidak menggunakan kendaraan untuk hal yang tidak perlu. Lebih baik menggunakan sepeda atau jalan kaki atau angkutan umum jika berbergian jarak dekat.

Mengurangi penggunaan kertas. Buku yang diterbitkan oleh Yayasan Garuda Nusantara (2011: 81) menjelaskan bahwa ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghemat penggunaan kertas, yaitu mendaur ulang kertas bekas, misalnya dengan menggunakan kertas sisa untuk catatan. Dengan mendaur ulang, maka akan mengurangi kebutuhan kayu dan melestarikan hutan. Selain itu, dapat dilakukan dengan mengumpulkan kertas-kertas bekas untuk diberikan ke pemulung atau dijual ke lapak daur ulang. Saat membuang sampah kertas, sebaiknya dipisahkan terlebih dahulu kertas yang berwarna dan sampah kertas putih. Hal yang perlu diingat bahwa sebaiknya hindari membakar sampah karena dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca.

Membuat kompos dari daun-daun kering. Kompos dapat menambah kemampuan tanah dalam menyimpan air dan menyerap pupuk tambahan lainnya. Kompos juga menciptakan lingkungan yang baik bagi kehidupan jasat retnik tanah sehingga tanah menjadi subur. Penggunaan 21 limbah

organik sebagai kompos berpotensi mengurangi sampah 30%-40% (Yayasan Garuda Nusantara, 2011: 81).

Memilah sampah organik dan anorganik. Mawardi., dkk (2011) menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengelola dan melestarikan lingkungan, salah satunya dengan cara mengelola sampah rumah secara mandiri. Upaya ini digunakan dengan memisahkan sampah organik (sayuran, sisa makanan, daun dan lain-lain) dan anorganik (plastik, kertas, kaleng, kaca, dan lain- lain).

Membuang sampah. Ada beberapa hal atau tips peduli sampah, yaitu tidak membuang sampah di jalan atau tidak pada tempatnya. Sampah seperti botol, kaleng, plastik, kardus dan kertas dapat dijual atau diberikan ke pemulung. Hindari tindakan membakar sampah rumah tangga karena dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca (efek rumah kaca).

Menghindari memusnahkan sampah dengan cara membakar. Menurut Widayati (2010) Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk pemusnahan sampah, diantaranya yaitu dengan penumpukan. Pada metode ini, sampah tidak dimusnahkan secara langsung, namun dibiarkan membusuk menjadi bahan organik atau Sanitary Landfill. Metode ini hampir sama dengan penumpukan, tetapi cekungan yang telah penuh terisi sampah ditutupi tanah (dikuburkan). Hindari metode pembakaran sampah, karena metode ini berisiko meningkatkan emisi gas rumah kaca (efek rumah kaca).

Secara sosial, keluarga memiliki fungsi sebagai tempat pendidikan. Fungsi ini sangat erat dengan tanggung jawab orangtua sebagai pendidik pertama anak-anaknya. Keluarga bertanggung jawab untuk mengembangkan anak-anak untuk berkembang menjadi pribadi yang matang, yang dapat bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakatnya. Usaha pendidikan ini berkaitan erat dengan fungsi keluarga sebagai tempat perlindungan. Kaitannya dengan alam dan lingkungan, keluarga memiliki peran strategis dalam menumbuhkan kesadaran dan mengembangkan pribadi yang bertanggung jawab untuk mengelola lingkungan sehingga dapat terjaga kelestarian dan ketersediaannya bagi kehidupan. Sebagai upaya penumbuhan akhlak lingkungan, keluarga dapat mengajarkan mengenai nilai-nilai utama terkait pengelolaan lingkungan, memberikan teladan dan mendorong pembiasaan sikap dan perilaku ramah lingkungan, serta secara penuh kekeluargaan dapat mengembangkan diskusi dalam rangka melakukan refleksi terhadap berbagai fenomena kerusakan alam sehingga dapat membentuk cara pandang, sikap dan perilaku anggota keluarga khususnya anak, yang ramah terhadap lingkungan (Mawardi., dkk, 2011).

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Lingkungan hidup sendiri memiliki arti kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan

dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

a. Lingkungan Hidup

1) Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan di Indonesia sering juga disebut "lingkungan hidup". Misalnya dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Definisi Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia, dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain dan dapat mempengaruhi hidupnya.

Pengertian lingkungan hidup bisa dikatakan sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar manusia atau makhluk hidup yang memiliki hubungan timbal balik dan kompleks serta saling mempengaruhi antara satu komponen dengan komponen. lainnya. Pengertian lingkungan hidup yang lebih mendalam menurut UU

No 32 Tahun 2009 adalah kesatuan ruang dengan semua benda atau kesatuan makhluk hidup termasuk di dalamnya ada manusia dan segala tingkah lakunya demi melangsungkan perikehidupan dan kesejahteraan manusia maupun makhluk hidup lainnya yang ada di sekitarnya.

Menurut Undang Undang UU No 32 Tahun 2009, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya. Pengertian dalam lingkungan hidup dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 menyebutkan pengertian pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Lingkungan hidup yang telah ditetapkan, sedangkan pengertian kerusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

2) Macam-macam Lingkungan Hidup

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, hidup dan kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari pengaruh lingkungan. Mempelajari lingkungan dalam kehidupan lebih banyak dipakai istilah lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor UU No 32 Tahun 2009 mengartikan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan

perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya”

Bisa diartikan, Lingkungan Hidup merupakan suatu sistem yang meliputi lingkungan hayati, lingkungan non hayati, lingkungan buatan dan lingkungan sosial. Sumber daya alam (SDA) merupakan salah satu unsur lingkungan alam, baik hayati maupun non hayati, yang diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya dan meningkatkan kesejahteraannya. Sumber daya alam sangat banyak dan

b. Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH)

1) Pengertian

Lingkungan hidup merupakan segala hal yang mempengaruhi kehidupan seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini. Menurut S.J McNaughton dan Larry L.Wolf mengartikannya “dengan semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung mempengaruhi kehidupan”. Emil Salim mengatakan “ Lingkungan hidup adalah segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia”.

2) Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini yaitu untuk dapat mengetahui masalah-masalah yang terjadi pada lingkungan hidup

serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Tujuan Pendidikan lingkungan hidup untuk membentuk manusia yang memiliki sikap dan perilaku sadar lingkungan dalam bentuk wujud nyata (partisipasi) keikutsertaan peserta didik untuk memunculkan karakter peduli secara lebih nyata, konkrit, tidak teoritis belaka serta sikap mau berkorban dan memberi (berkontribusi) bagi kepentingan lingkungan itu sendiri.

3) Sasaran

Sasaran kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup adalah:

1. Terlaksananya Pendidikan Lingkungan Hidup di lapangan sehingga dapat tercipta kepedulian dan komitmen masyarakat dalam turut melindungi, melestarikan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang baik.
2. Tercakupnya seluruh kelompok masyarakat, baik di perdesaan dan perkotaan, tua dan muda, laki-laki dan perempuan di seluruh wilayah Indonesia sehingga tujuan Pendidikan Lingkungan Hidup bagi seluruh rakyat Indonesia terwujud dengan baik.

4) Ruang Lingkup

Dalam implementasi PLH dapat ditempuh melalui jalur pendidikan diantaranya:

1. Pendidikan Formal dan Non Formal

Pendidikan lingkungan diselenggarakan secara fleksibel, formal dan non formal, kedua jalur pendidikan tersebut harus bersinergi menuju tujuannya. Yang artinya pendidikan lingkungan tidak saja hanya diberikan pada sekolah, perti, atau lembaga akademik saja, pendidikan lingkungan juga diajarkan di luar sekolah (Non formal) masyarakat juga sebagai populasi manusia yang juga harus memperhatikan dan mempedulikan lingkungan.

2. Pendidikan Seumur Hidup

Peserta didik disiapkan untuk memiliki kemampuan mengaktualisasikan pemahaman lingkungannya setiap saat, selama- lamanya meskipun tidak di bangku sekolah/ perkuliahan. Prinsipnya pendidikan lingkungan hidup dipahami sebagai pendidikan seumur hidup.

3. Lintas Usia dan strata

Prinsip kedua pendidikan lingkungan diberikan kepada seluruh kalangan, strata, sosial ekonomi, usia, jenjang pendidikan, tidak ada batasan dalam objek pendidikan lingkungan, tentu saja harus mempertimbangkan porsi materi dan kemampuan berpikir peserta didik.

4. Terintegrasi, Tidak terpisah

Pendidikan lingkungan harus terintegrasi ke dalam cabang ilmu lain, yang diselipkan ke dalam mata ajar, mata kuliah,

program studi, dan keahlian/profesi. Bagaimanapun juga kondisinya pendidikan lingkungan harus dimasukkan dan terintegrasi. Sesuai tujuan pendidikan lingkungan harus menyesuaikan dengan situasi lokal/daerah tempat peserta didik berada atau beraktifitas sehari-hari. Misal peserta didik yang tinggal di sekitar pabrik tentu saja fokus materi PLH tentang pemahaman industrialisasi, eksploitasi SDA. Sedangkan yang berdomosili di perkotaan fokus materi pendidikan lingkungan tentang industrialisasi transportasi, energi dan sebagainya, yang diarahakan kepada aspek kelembagaan, SDM yang terkait dalam masyarakat maupun objek PLH, sarana prasarana, pendanaan, materi, komunikasi, masyarakat dan metode pelaksanaan.

5) Landasan Kebijakan PLH

Menurut UU PLH No.23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup“ kesatuan ruang dengan semua benda, daya, dan keadaan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.”

1. UU no 22 th 1999 (Pemda)
2. UU no 25 th 1999 (perimbangan keuangan antara pem. Pusat dan daerah)

3. UU no. 25 th 1999 (pembangunan nasional)
4. UU no 20 th 2003 (sisdiknas)
5. Kep menneg kependudukan dan lingkungan hidup dan menag RI No. 15 tahun 1991.

B. Penelitian yang Relevan

2. Penelitian yang dilakukan oleh Riza Stiyarini (2015) dengan Skripsi judul “Implementasi Kurikulum Pendidikan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana di SMA Negeri Banguntapan 2 Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta”.

Hasil penelitian menunjukkan:

Kurikulum pendidikan lingkungan hidup dan mitigasi bencana di SMA Negeri 2 Banguntapan Bantul pelaksanaannya berpedoman pada KTSP. Secara keseluruhan kurikulum sudah memenuhi kriteria minimal standar isi dari standar nasional pendidikan. Materi dan kompetensi minimal tentang lingkungan hidup dan mitigasi bencana yang di dalamnya memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum serta beban belajar. Model kurikulum yang digunakan cenderung pada CBA (*Concerns-Based Adaption Model*) menurut Orstein dan Hupkins.

Proses pembelajaran pendidikan lingkungan hidup dan mitigasi bencana di SMA Negeri 2 Banguntapan Bantul berupa kegiatan belajar mengajar dengan memadukan dua pendekatan yaitu monolitik dan integratif. Pendekatan monolitik berupa mata pelajaran PLH dengan beban belajar selama 45 menit dalam satu minggu. Metode dalam pembelajaran

yaitu lebih banyak penugasan siswa. Pembelajaran berpedoman pada KTSP dan RPP tanpa silabus. Sumber belajar berasal dari guru mata pelajaran yang diambil dari internet. Kriteria Kelulusan Minimal (KKM) yaitu 75. Pendekatan integratif berupa memasukkan materi pada beberapa pokok bahasan semua mata pelajaran terkait dan kegiatan ekstrakurikuler KIR.

Sarana dan prasarana dalam implementasi kurikulum pendidikan lingkungan hidup dan mitigasi bencana di SMA Negeri 2 Banguntapan Bantul adalah sebagai pendukung kegiatan belajar mengajar PLH sudah baik dan terus melengkapi dan meningkatkan kualitasnya dalam upaya penghematan energi, air, alat tulis, pengembangan sistem pengelolaan sampah dan pengembangan apotik hidup serta taman sekolah. Pengaturan sarana dan prasarana dengan mengutamakan keselamatan siswa yang disertai peta jalur evakuasi. Namun, penataan apotik hidup dan keberfungsian laboratorium lingkungan hidup dan mitigasi belum maksimal.

Persamaan dalam penelitian ini ialah terkait pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup, adapun perbedaannya adalah terletak pada penelitian mitigasi bencana. Bagaimana pendidikan lingkungan hidup dapat berjalan selaras dengan mitigasi bencana.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Kurnia Lusty (2013) dengan judul “Penerapan Pendidikan Lingkungan Hidup Studi Kasus di SDN Dinoyo 2 Malang”

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) dikembangkan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi degradasi lingkungan dengan mempersiapkan sumber daya manusia berkualitas yang memiliki kemampuan untuk mengelola lingkungan dengan baik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan, pemahaman, persepsi dan motivasi kepala sekolah, Berdasarkan kesimpulan peneliti, maka disarankan, (1) bagi kepala sekolah mampu memberikan program-program yang menunjang kemajuan sekolah, terutama dalam bidang lingkungan hidup dan meningkatkan lebih banyak kerjasama dengan berbagai pihak, (2) bagi guru yaitu lebih mampu menguasai materi pendidikan lingkungan yang mengandung nilai-nilai peduli dan berbudaya lingkungan. Guru lebih aktif dan tanggap dalam permasalahan lingkungan. (3) Bagi peneliti lain diharapkan untuk dapat dijadikan bahan acuan untuk mengembangkan penelitian sejenis, terutama mengenai tentang faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kegiatan PLH sehingga memiliki referensi lebih banyak.

Persamaan dalam penelitian ini ialah terkait penerapan serta pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup, adapun perbedaannya adalah terletak pada subjek penelitian yaitu pada penelitian ini subjeknya umum yaitu warga sekolah. Bagaimana pendidikan lingkungan hidup dapat diterapkan pada warga SD Dinoyo 2 Malang.

C. Alur Pikir Penelitian

Tidak semua kebijakan berhasil dilaksanakan secara sempurna. Pada umumnya pelaksanaan kebijakan lebih sukar karena pelaksanaan kebijakan

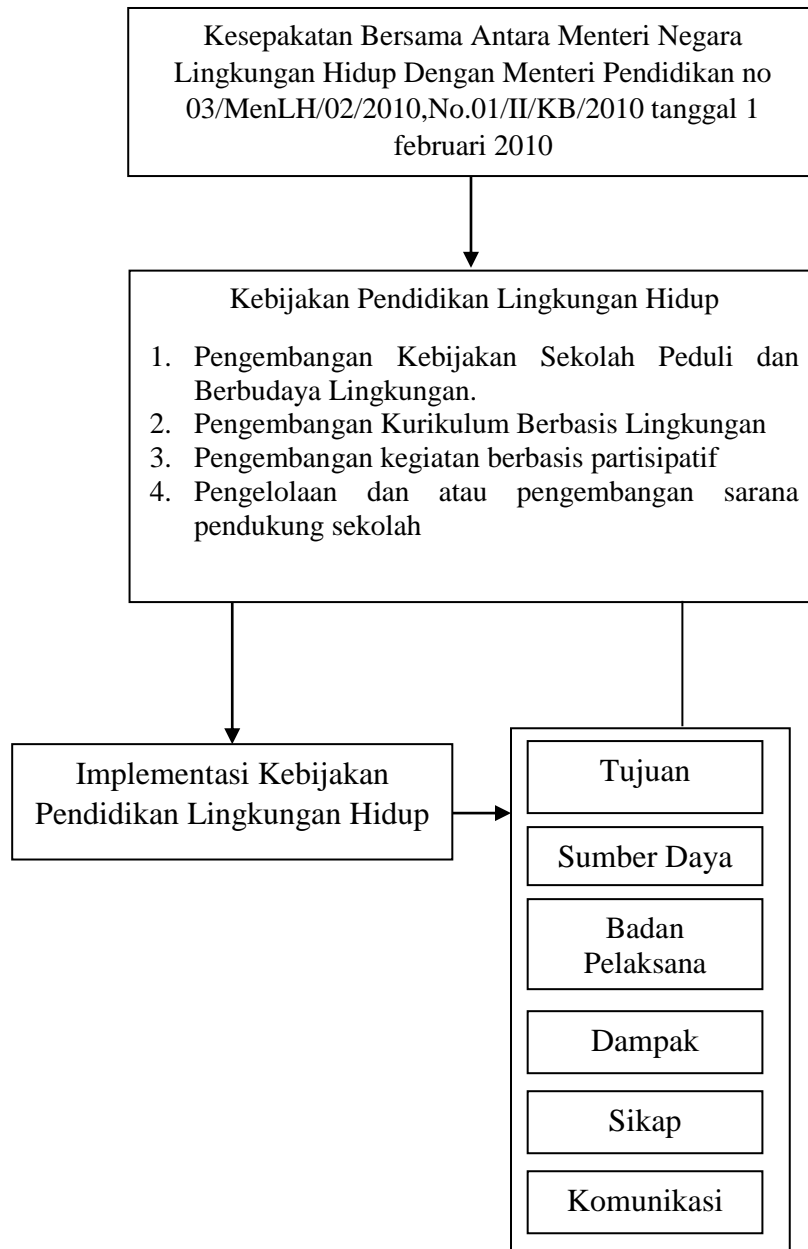
berkaitan dengan kondisi riil yang sering berubah dan sukar diperkirakan. Kondisi riil tersebut berbeda dengan asumsi-asumsi generalisasi dan simplifikasi ketika kebijakan tersebut dalam proses dirumuskan. Sebagai akibatnya pada proses pelaksanaan muncul *implementation gap* atau kesenjangan, perbedaan antara apa yang dirumuskan dalam kebijakan dan apa yang dapat dilaksanakan.

Menurut Grindle untuk melaksanakan sebuah kebijakan tidak akan lepas dari fenomena isi kebijakan dua diantaranya adalah derajat perubahan dan pelaksana program. Apa yang diharapkan dengan melaksanakan program tersebut dan siapa yang akan melaksanakan program tersebut sangat mempengaruhi kinerja implementasi.

Sedangkan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat implementasi *implementation gap* tersebut sangat dipengaruhi oleh kegiatan dan cara-cara yang dipakai dalam berkomunikasi diantara para pelaksana program. Cara para komunikator berkomunikasi akan sangat berpengaruh pada kemampuan sumber daya manusia yang menjadi target pelaksanaan kebijakan. Komunikasi disebut efektif apabila informasi yang dikomunikasikan mencapai tujuan seperti yang diharapkan oleh komunikator. Kompetensi para pelaksana tentang isi kebijakan akan meningkat secara otomatis apabila komunikasi berjalan efektif. Komunikasi yang efektif diantara para pelaksana yang menguasai isi kebijakan akan berpengaruh pada sikap atau disposisi para pelaksana program yang akhirnya akan berpengaruh pada kinerja kebijakan.

Oleh sebab itu peneliti akan menggunakan data dan informasi yang diperoleh kemudian menganalisis keterkaitan data dan informasi tersebut dengan fenomena fenomena derajat perubahan, pelaksana program, komunikasi, sumber daya dan disposisi tentang implementasi kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup di Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Yogyakarta.

Adapun alur/kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3. Kerangka Berpikir

D. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana partisipasi siswa dalam implementasi kebijakan PLH (Pendidikan Lingkungan Hidup) pada aspek tujuan?
2. Bagaimana partisipasi siswa dalam implementasi kebijakan PLH (Pendidikan Lingkungan Hidup) pada aspek badan pelaksanaan?
3. Bagaimana partisipasi siswa dalam implementasi kebijakan PLH (Pendidikan Lingkungan Hidup) pada aspek dampak?
4. Bagaimana partisipasi siswa dalam implementasi kebijakan PLH (Pendidikan Lingkungan Hidup) pada aspek sikap?
5. Bagaimana partisipasi siswa dalam implementasi kebijakan PLH (Pendidikan Lingkungan Hidup) pada aspek Sumber Daya?
6. Bagaimana partisipasi siswa dalam implementasi kebijakan PLH (Pendidikan Lingkungan Hidup) pada aspek komunikasi?
7. Apa saja faktor-faktor pendukung partisipasi siswa dalam implementasi kebijakan PLH (Pendidikan Lingkungan Hidup)?
8. Apa saja faktor-faktor penghambat partisipasi siswa dalam implementasi kebijakan PLH (Pendidikan Lingkungan Hidup)?

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab ini dibahas tentang jenis dan pendekatan penelitian, subyek, obyek, lokasi dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen yang digunakan dalam penelitian, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini.

A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (1975: 20) dalam Lexy J. Moloeng (2005: 4), penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Penelitian kualitatif memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik/utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif (*reciprocal*). Penelitian dilakukan pada obyek yang alamiah. Obyek yang alamiah adalah obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut.

Dalam penelitian kualitatif, gejala bersifat *tholistic* (menyeluruh, tidak dapat dipisahkan), sehingga peneliti kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variable penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktifitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti berusaha untuk menggambarkan atau mendiskripsikan bagaimana partisipasi siswa dalam implementasi Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) serta faktor pendukung dan penghambat Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) di SMP Negeri 7 Yogyakarta.

B. Subyek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber data yang dimintai informasinya sesuai dengan masalah penelitian (Suharsimi Arikunto, 2002: 107). Subyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dipilih menurut tujuan penelitian. Subyek penelitian ini diambil melalui teknik dengan cara memilih subyek penelitian dengan pertimbangan tertentu, yaitu dengan cara memilih orang tertentu yang dianggap paling tahu tentang apa yang akan diteliti dan memilih subyek penelitian seorang pemimpin sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2009: 219).

Subyek penelitian memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan penelitian karena melalui subjek penelitian inilah peneliti dapat memperoleh data tentang variabel yang akan diteliti. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Kepala SMP Negeri 7 Yogyakarta, guru, dan siswa.

C. Setting Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penetapan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggung jawabkan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih oleh peneliti adalah SMP N 7 Yogyakarta. Penentuan

SMP N 7 Yogyakarta sebagai lokasi penelitian dengan alasan bahwa SMP N 7 Yogyakarta merupakan sekolah yang menerapkan kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) di Yogyakarta yang dipilih oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta. Dengan demikian peneliti memilih sekolah tersebut untuk mengetahui bagaimana partisipasi siswa dalam implementasi Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) di SMP Negeri 7 Yogyakarta serta faktor pendukung dan penghambatnya.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan April 2017. Waktu pelaksanaan penelitian secara garis besar tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel 3. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Waktu	Kegiatan
Februari 2017	Prariset terkait kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) di SMP N 7 Yogyakarta
	Mengurus surat ijin penelitian (Fakultas dan Dinas Perijinan)
2 Maret 2017 - 31 Maret 2017	Penelitian
3 April 2017 – Mei 2017	Analisis Data

D. Teknik Pengumpulan Data

Suharsimi Arikunto (2002: 136) mengemukakan bahwa teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik dalam memperoleh data, yaitu:

1. Observasi

Menurut Sukandarrumidi (2002: 69), observasi adalah pengamatan dan pencatatan sesuatu objek dengan sistematis fenomena yang diselidiki. Sementara menurut Gulo (2002:116), pengamatan (observasi) adalah metode pengumpulan data di mana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Penyaksian terhadap peristiwa-peristiwa bisa dilakukan dengan melihat, mendengar, merasakan, yang kemudian dicatat seobyektif mungkin.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan berlangsungnya Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) di SMP Negeri 7 Yogyakarta. Pengamatan dilakukan dengan melihat kegiatan, perilaku warga sekolah maupun sarana dan prasarana sekolah yang mendukung berlangsungnya pendidikan lingkungan hidup (PLH).

2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Selain menangkap pemahaman atau ide, wawancara dapat menangkap perasaan, pengalaman, emosi, motif, yang dimiliki responden (W.Gulo,2002:119)

Dalam penelitian ini yang dijadikan informan adalah:

- a. Kepala SMP N 7 Yogyakarta, untuk mendapatkan informasi tentang sejarah, visi dan misi, implementasi Pendidikan Lingkungan Hidup

serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup di SMP Negeri 7 Yogyakarta.

- b. Guru, untuk memperoleh informasi atau data tentang implementasi Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) di SMP Negeri 7 Yogyakarta.
- c. Siswa, untuk memperoleh informasi tentang pendidikan lingkungan hidup di SMP Negeri 7 Yogyakarta.

3. Studi Dokumen

Suharsimi Arikunto (2002: 206) mengemukakan bahwa dokumentasi adalah metode dalam mencari data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, *legger*, agenda dan sebagainya. Dokumentasi dalam kegiatan penelitian ini dilakukan untuk mendukung kelengkapan data dari hasil pengamatan dan hasil wawancara yang telah dilakukan. Data dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data siswa, data guru, data visi misi sekolah, data program, dan data-data sekolah yang berhubungan dengan kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) di SMP N 7 Yogyakarta.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan realibilitas instrumen. Dalam penelitian kualitatif yang menjadi utama adalah peneliti itu sendiri. Selain itu digunakan juga beberapa instrumen pendukung, meliputi pedoman wawancara, pedoman observasi dan kuesioner (Sugiyono, 2009: 222)

Menurut Sugiyono (2009: 222), peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya.

Bentuk instrumen pendukung yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi, pedoman wawancara dan pedoman dokumentasi.

1. Pedoman Observasi

Pedoman observasi dalam penelitian ini disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4. Kisi-Kisi Pedoman Observasi

No	Aspek yang diamati	Indikator yang dicari	Sumber Data
1	Observasi Fisik/kondisi lingkungan	Keadaan sekolah	Pengamatan Peneliti
		Letak dan alamat	
		Sarana dan prasarana sekolah	
		Fasilitas penunjang	
2	Observasi Kegiatan	Interaksi warga sekolah	
		Pelaksanaan program	
		Kegiatan siswa	

2. Pedoman Wawancara

Tabel 5. Kisi-Kisi Pedoman Wawancara

No	Aspek yang ditanyakan	Aspek yang dicari	Sumber
1.	Partisipasi Siswa dalam implementasi Kebijakan PLH di SMP Negeri 7 Yogyakarta	1.Tujuan kebijakan 2.Sumber daya kebijakan 3.Badan pelaksana kebijakan 4.Dampak kebijakan 5.Sikap pelaksana kebijakan 6.Komunikasi	1.Kepala Sekolah 2.Guru 3.Siswa
2.	Faktor pendukung dan penghambat partisipasi siswa dalam implementasi PLH di SMP Negeri 7 Yogyakarta	1.Faktor internal 2.Faktor eksternal	

3. Pedoman Dokumentasi

Tabel 6. Kisi-Kisi Pedoman Dokumentasi

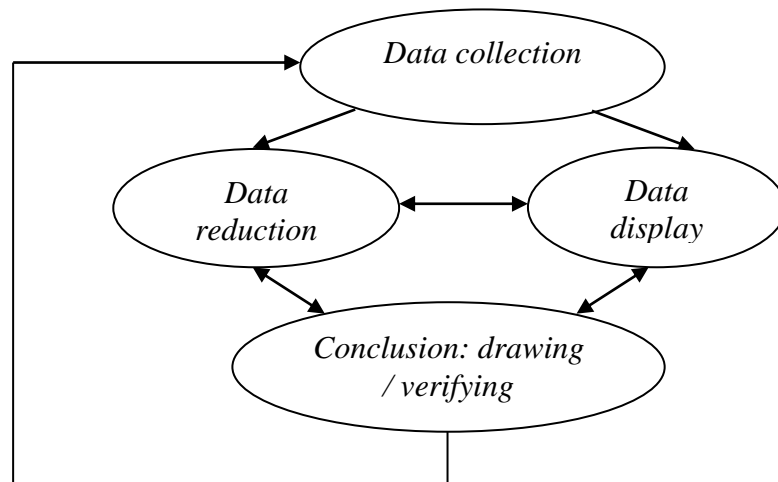
No	Aspek yang dicari	Indikator yang dicari	Sumber
1	Gambaran Umum SMP Negeri 7 Yogyakarta	1.Profil Sekolah	Data Sekolah
		2.Visi Misi	
		3.Data Siswa	
		4.Data pendidik dan tenaga kependidikan	
		5.Sarana dan prasarana sekolah	
2	Materi	1.Silabus	Guru
		2.RPP	

F. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono, (2009:243) dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh.

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Habermen (1984), mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Miles dan Hubermen (1984), mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification* (Sugiyono, 2009: 246-247).

Langkah-langkah dalam analisis data penelitian ditunjukkan pada gambar berikut ini:



Gambar 4. Komponen dalam analisis data model Miles and Huberman

1. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema polanya. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman (1984) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

G. Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Terdapat tiga jenis triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, pengumpulan data, dan triangulasi waktu (Sugiyono, 2009: 273-274). Dalam teknik ini, peneliti menggunakan dua triangulasi yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data.

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam penelitian ini, sumber data yang menjadi informan adalah wakil kepala sekolah, guru dan siswa.

2. Triangulasi teknik pengumpulan data

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi.

Keabsahan data dalam penelitian yang dilakukan menggunakan penggabungan antara triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Data yang diperoleh dari berbagai sumber melalui wawancara kemudian dicek kesesuaiannya dengan data yang diperoleh melalui observasi dan dokumentasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Objek Penelitian

a. Sejarah SMP N 7 Yogyakarta

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, para pendidik SMP N 3 Yogyakarta yang dikoordinasi Bpak R. Ng. Dwijo Martoyo mengadakan rapat berulang-ulang untuk memenuhi keinginan rakyat yang ingin bersekolah. Langkah pertama yang ditempuh adalah membuka sekolah sore, namun tidak diijinkan oleh Inspeksi SMP DIY, jalan lain yang ditempuh adalah mencari daerah kecamatan yang bersedia mendirikan dan membangun SMP.

Upaya di atas disambut positif oleh BP. E.W. Prodjorianto yang menjabat sebagai camat di Tegalrejo pada saat itu. Beliau menginginkan SMP dibangun di daerah kekuasaannya untuk melayani masyarakat. Sebagai realisasinya, pada tanggal 2 September 1963, SMP N Tegalrejo *filial* SMP N 3 Yogyakarta dibuka secara resmi oleh Inspeksi DIY. Pada awal berdirinya, pengajar SMP N 7 Yogyakarta diambil dari SMP N 3 Yogyakarta di Pajeksan. Kegiatan belajar mengajar berlangsung di rumah Bp. Ruslan Padmopawiro (sebelah barat monumen Tegalrejo) dan Bapak Junasmoro selaku petugas yang disertai jalannya sekolah ini.

Panitia pendiri gedung dipimpin oleh RW Prodjorijianto dan Bp. Trisnokarjono beserta POMG (Para Orangtua Murid dan Guru) terus mengupayakan gedung baru. Pada tahun 1966 SMP N 7 Tegalrejo mengurus statusnya ke departemen P dan K di Jakarta namun hasilnya nihil.

Seiring berjalannya waktu, pada tanggal 1 Januari 1974 papan nama SMP N 7 Yogyakarta diboyong ke Jalan Demakan Nomor 9 (sekarang Jl. Wiratama 38 Yogyakarta). Dengan adanya data riwayat SMP N 7 Yogyakarta maka ada 3 momentum yang layak kita ingat dan perlu kita kenang, yaitu: (1) Tanggal 1 Agustus 1960, saat berdirinya SMP N 7 Yogyakarta di Jalan Jati Nomor 2 Yogyakarta; (2) Tanggal 2 September 1963, saat peresmian SMP N Tegalrejo Filial dari SMP N 3 Yogyakarta Jl. Pajeksan Nomor 18. Tanggal 1 Januari 1974 dipindahkannya papan nama SMP N 7 Yogyakarta dari Jalan jati Nomor 2 ke Jl. Demakan Baru Nomor 9 (sekarang Jalan Wiratama No 38 Yogyakarta).

b. Visi dan Misi SMP N 7 Yogyakarta

1) Visi

Berakhlak mulia, unggul dalam prestasi, dan berwawasan lingkungan.

2) Misi

Visi SMP N 7 Yogyakarta di atas diwujudkan oleh sekolah melalui beberapa misi, yaitu: (a) Menciptakan kehidupan agamis;

(b) Menumbuhkan semangat berkompetisi baik dalam bidang akademik maupun non akademik; (c) Berprestasi di bidang akademis dan nonakademis; (d) Mendidik siswa menjadi pribadi yang berakhlak mulia; (e) Membangun budaya disiplin warga sekolah; (f) Mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat dan nyaman.

c. Tujuan pendidikan SMP Negeri 7 Yogyakarta

SMP N 7 Yogyakarta tentu memiliki tujuan pendidikan yang akan dicapai, meliputi: (1) Mengamalkan ajaran agama; (2) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara profesional; (3) Berprestasi di bidang akademis dan non akademis; (4) Mengembangkan potensi siswa di bidang sains, seni budaya, dan olahraga melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler; (5) Menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan nyaman; (6) Menyelenggarakan kegiatan yang menumbuhkan semangat berkompetisi; (7) Menciptakan budaya tertib dan disiplin warga sekolah; serta (8) Membiasakan senyum, sapa, dan salam.

d. Indikator keberhasilan/capaian Tujuan SMP Negeri 7 Yogyakarta

Sebagai timbal balik keberadaan visi, misi, dan tujuan pendidikan, maka SMP N 7 Yogyakarta menetapkan suatu indikator untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan. Indikator keberhasilan yang dimaksud yaitu: (1) Pengembangan sikap peserta didik menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, disiplin,

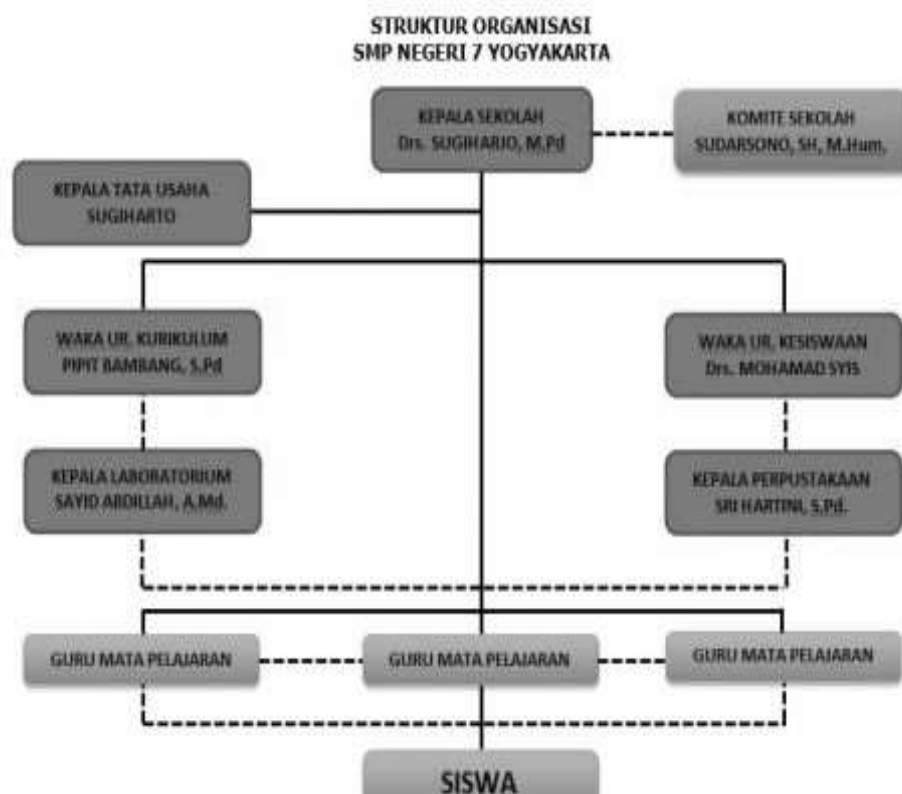
berakhlak mulia, cakap, dan demokratis (Berlandaskan pendidikan Budaya dan Karakter bangsa); (2) Rata-rata Nilai Ujian Nasional $> 8,0$; (3) Persentase lulusan 100 %; dan (4) Persentase lulusan melanjutkan ke jenjang sekolah lanjutan 100% baik di SMA, SMK/MAN.

e. Struktur organisasi SMP N 7 Yogyakarta

Struktur organisasi di SMP N 7 Yogyakarta tersusun atas beberapa komponen, yaitu Kepala Sekolah yaitu oleh Bapak Drs. Sugiharjo, M.Pd.; Komite Sekolah yang diketuai oleh Bapak Sudarsono, SH, M.Hum; Kepala Tata Usaha yaitu Bapak Sugiharto; Waka UP. Kurikulum yang dijalankan oleh Bapak Pipit Bambang, S.Pd.; Waka UP. Kesiswaan yang dijalankan oleh Bapak Drs. Muhammad, SYIS.; Kepala Perpustakaan yaitu Ibu Sri Hartini, S.Pd. Selain beberapa jabatan yang telah disebutkan, tentu SMP N 7 Yogyakarta memiliki komponen terpenting dalam melaksanakan proses belajar mengajar, yaitu guru dan siswa.

Kepala Sekolah merupakan pimpinan di SMP N 7 Yogyakarta. Kepala Sekolah wajib memberikan pertanggungjawaban kepada Komite Sekolah. Dalam pelaksanaannya, tugas Kepala Sekolah dibantu oleh beberapa jabatan perbidang, yaitu Tata Usaha, Kurikulum, Kesiswaan, dan Kurikulum. Kepala Sekolah dan semua pejabat bidang bersama-sama mewujudkan proses belajar mengajar yang berkualitas di SMP N 7 Yogyakarta dengan meningkatkan

kualitas guru dan siswa. Secara lebih ringkas, struktur organisasi di SMP N 7 Yogyakarta digambarkan dalam bagan di bawah ini.



Gambar 5. Struktur Organisasi SMP N 7 Yogyakarta

f. Fasilitas SMP Negeri 7 Yogyakarta

Fasilitas yang dimiliki SMP Negeri 7 Yogyakarta secara umum dapat dikategorikan dalam 2 kelompok, yaitu (1) fasilitas kegiatan belajar mengajar dan (2) fasilitas penunjang lainnya. Kedua kategori fasilitas tersebut memiliki penjabaran masing-masing.

1) Fasilitas kegiatan belajar mengajar

Fasilitas belajar mengajar adalah sarana prasarana yang secara langsung menunjang dalam proses pendidikan, utamanya kegiatan belajar sehingga terciptanya pembelajaran yang teratur

dan berkelanjutan. Dalam hal ini fasilitas kegiatan belajar mengajar yang dimiliki SMP Negeri 7 Yogyakarta meliputi ruang belajar, laboratorium IPA, laboratorium komputer, perpustakaan, ruang multimedia, dan sruang musik. Data sarana prasarana SMP N 7 Yogyakarta secara lebih rinci tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel 7. Data Fasilitas Belajar Mengajar SMP N7 Yogyakarta

Ruang	Jumlah	Luas per Ruangan
Ruang belajar	18	7 x 9 m ²
Laboraorium IPA	2	12 x 9 m ²
Laboratorium komputer	2	12 x 9 m ²
Perpustakaan	1	16 x 5 m ²
Ruang Multimedia	1	9 x 7 m ²
Ruang Musik	1	9 x 7 m ²

2) Fasilitas Penunjang lainnya

Bagian yang mendukung kelancaran proses belajar mengajar, diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran meskipun tidak secara langsung yaitu:

- a) Ruang Kepala Sekolah
- b) Ruang Wakil Kepala Sekolah
- c) Ruang Guru
- d) Ruang Bimbingan dan Konseling
- e) Ruang Tata Usaha
- f) Ruang OSIS
- g) Mushola
- h) Ruang Agama Kristen
- i) Ruang Agama Katholik
- j) Ruang Pertemuan Utama
- k) Ruang Pertemuan Terbatas
- l) Ruang UKS
- m) Ruang Piket Guru
- n) Ruang Penjaga Keamanan
- o) Ruang *Photocopy*
- p) Ruang Gudang Olahraga
- q) Kantin Sekolah

- r) Kamar Mandi Kepala Sekolah
- s) Kamar Mandi Guru
- t) Kamar Mandi Siswa
- u) Lapangan Upacara
- v) GOR (penggunaannya secara bersama 3 sekolah)

Status kepemilikan tanah adalah milik Pemerintah Kota Yogyakarta, Secara keseluruhan luas lahan SMP Negeri 7 Yogyakarta adalah 3076 m², dengan luas bangunan 2644 m².

g. Tata Tertib

SMP N 7 Yogyakarta menyusun dan menetapkan tata tertib sekolah untuk senantiasa dipatuhi. Tata tertib tersebut tersusun atas beberapa poin, dijabarkan di bawah ini.

Pakaian sekolah

1) Pakaian seragam sekolah

Aturan terkait pemakaian seragam sekolah digolongkan ke dalam dua peraturan, yaitu seragam OSIS untuk hari Senin hingga Kamis, seragam pramuka dipakai hari Jumat, dan seragam identitas dipakai pada hari Sabtu. Masing-masing seragam, dikenakan dengan atribut-atribut tertentu sesuai dengan peraturan yang telah disepakati dalam tata tertib. Peraturan terkait atribut dan perlengkapan yang harus dikenakan disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 8. Tata Tertib Pemakaian Seragam SMP N7 Yogyakarta

Jenis Seragam	Waktu Pemakaian	Perlengkapan dan Aturan Pemakaian
OSIS	Senin-Kamis	Ikatan pinggang hitam, dasi biru ,dan topi biru berlogo SMP Negeri 7 Yogyakarta.
		Atribut lengkap (badge OSIS, nama, lokasi sekolah,tanda kelas,tanda merah putih.
		Sepatu warna hitam polos bertali hitam, kaos kaki warna putih logo SMP.
		Kemeja harus dimasukkan sehingga ikat pinggang terlihat.
Pramuka	Jumat	Ikatan pinggang hitam berlogo SMP Negeri 7 Yogyakarta.
		Hasduk/setangan leher.
		Atribut lengkap (badge tunas kelapa, pandu dunia,Daerah Istimewa Yogyakarta, Gugus depan, tanda regu, nama, tanda khusus)
		Topi pramuka.
		Sepatu warna hitam polos bertali hitam, kaos kaki warna hitam logo gugus depan SMP
		Kemeja harus dimasukkan sehingga ikat pinggang terlihat.
Identitas	Sabtu	Sepatu warna hitam polos bertali hitam, kaos kaki putih berlogo SMP
		Bagi putra, kemeja tidak dimasukkan kedalam celana panjang dan bagi putri kemeja dimasukkan ke dalam rok
Olahraga		Untuk pelajaran Olahraga, siswa wajib memakai pakaian olahraga yang ditetapkan oleh sekolah dan sepatu warna hitam polos.
Ketentuan Lain		
Khusus Putra		Khusus Putri
Panjang lengan kemeja adalah 5 cm di atas siku.		Kemeja dimasukkan ke dalam rok, panjang lengan 5 cm di atas siku kecuali yang berjilbab sampai pergelangan tangan.
Panjang celana sampai menutupi mata kaki.		Panjang rok sampai mata kaki.
Celana panjang model sesuai dengan ketentuan sekolah.		

2) **Kedisiplinan**

- a) Siswa wajib hadir di sekolah pukul 06.40 WIB.
- b) Siswa wajib menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum pelajaran dimulai dan menyanyikan satu lagu perjuangan, daerah di akhir kegiatan belajar mengajar.
- c) Kegiatan belajar mengajar diawali dan diakhiri dengan do'a, dipimpin oleh ketua kelas/petugas piket.
- d) Siswa wajib membawa naskah Asmaul Khusna, Juz 'Ammah yang sudah disediakan oleh sekolah, dan mengikuti kegiatan awal pelajaran dengan berdo'a bersama, membaca Asmaul Khusna dan Juz 'Ammah bagi yang beragama Islam, bagi yang beragama lain menyesuaikan.
- e) Siswa yang terlambat wajib lapor kepada guru piket/BK, masuk ke dalam kelas harus membawa surat izin dari guru piket/BK.
- f) Pada waktu kegiatan belajar mengajar berlangsung siswa dilarang menggunakan laptop tanpa seizin guru mata pelajaran.
- g) Pada pergantian jam pelajaran siswa dilarang keluar dari kelas kecuali ada kepentingan dan seizin guru yang mengajar berikutnya.

- h) Pada jam istirahat siswa tidak diperkenankan keluar dari lingkungan sekolah kecuali seizin guru piket atau kepala sekolah.
- i) Pada waktu guru berhalangan hadir, piket kelas wajib melaporkan kepada guru piket atau guru pengganti.
- j) Pada waktu kegiatan belajar mengajar di laboratorium, perpustakaan, siswa wajib menaati tata tertib yang ada di laboratorium, perpustakaan.
- k) Siswa pulang sekolah setelah tanda bel pulang sekolah dibunyikan.
- l) Siswa yang meninggalkan sekolah sebelum pelajaran berakhir, wajib minta izin kepada guru yang mengajar pada saat itu dan disetujui oleh guru piket/BK.
- m) Siswa yang terlambat masuk sekolah lebih dari 3 kali berturut-turut dalam 1 bulan tanpa keterangan yang jelas, diberikan pembimbingan oleh guru BK.
- n) Siswa yang berhalangan hadir/tidak masuk sekolah, harus ada surat izin dan orang tua/wali, jika sakit lebih dari 3 hari berturut-turut harus menyertakan surat keterangan dari dokter.
- o) Siswa yang tidak hadir tanpa keterangan lebih dari 3 hari berturut-turut akan diadakan panggilan tertulis dari pihak sekolah (wali kelas).

- p) Jika sudah dilakukan panggilan tertulis siswa tetap belum hadir maka dilakukan *home visite* oleh wali kelas dan guru BK.

3) Ketertiban dan kebersihan

- a) Siswa wajib menjaga kebersihan, keindahan, dan keutuhan peralatan/sarana prasarana sekolah.
- b) Siswa wajib menjaga ketertiban, ketenangan, dan kebersihan di kelas, perpustakaan, laboratorium dan tempat lain di lingkungan sekolah.
- c) Setiap kelas dibentuk regu piket kelas yang secara bergiliran bertugas menjaga ketertiban dan kebersihan kelas.
- d) Regu piket kelas datang/berada di sekolah paling lambat 30 menit sebelum pelajaran dimulai.
- e) Regu piket harus bertanggung jawab atas kebersihan ruang kelas sebelum, selama, dan sesudah jam KBM.
- f) Siswa merapikan, merawat, dan menjaga alat-alat serta inventaris kelas.
- g) Siswa bertanggung jawab atas kebersihan dinding kelas, meja kursi, kaca jendela dari kotoran dan coretan.
- h) Siswa harus menjaga suasana belajar yang aman, tenang, tertib di kelas, laboratorium, perpustakaan dan tempat lain di lingkungan sekolah.

- i) Siswa harus bertanggung jawab terhadap peminjaman buku di perpustakaan, penggunaan laboratorium, dan sumber belajar lainnya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
- j) Siswa yang merusakkan fasilitas sekolah karna disengaja atau tidak disengaja, menjadi tanggung jawab siswa yang bersangkutan.
- k) Setiap hari Jum'at siswa wajib mengikuti kegiatan kesiswaan.
- l) Setiap hari Sabtu siswa kelas 7 dan 8 wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, siswa kelas 9 wajib mengikuti kegiatan pengembangan diri di bidang akademik.

4) Upacara bendera dan peringatan hari-hari besar

- a) Setiap hari Senin dan hari besar nasional siswa wajib mengikuti upacara bendera dengan pakaian seragam yang telah ditentukan oleh sekolah, kecuali sakit/izin dari orang tua atau sekolah.
- b) Siswa yang terlambat dan melanggar aturan tata tertib sekolah membentuk barisan tersendiri dan mendapat bimbingan dari wali kelas.
- c) Setiap siswa wajib mengikuti kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh sekolah.

5) Kegiatan ekstrakurikuler

Tata tertib berkaitan dengan kegiatan ekstrakurikuler meliputi: (a) Seluruh siswa wajib menjadi anggota Organisasi Intra Sekolah (OSIS); (b) Siswa kelas tujuh dan delapan diwajibkan

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan mengikuti salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh sekolah sesuai dengan bakat dan minat masing-masing; (c) Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan dan diatur sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh sekolah.

6) Tata Krama

- a) Setiap siswa hendaknya melaksanakan 5S (senyum, salam, sapa, sopan, dan santun) ketika bertemu dengan sesama siswa, guru, karyawan, kepala sekolah, dan seluruh warga SMP Negeri 7 Yogyakarta.
- b) Saling menghormati antar sesama siswa, menghargai perbedaan dalam memilih teman belajar, bermain, dan bergaul baik di sekolah maupun di luar sekolah.
- c) Berani menyampaikan sesuatu yang salah adalah salah dan menyatakan sesuatu yang benar adalah benar secara sopan tanpa menyinggung perasaan orang lain.
- d) Membiasakan diri mengucapkan terimakasih setelah menerima bantuan atau jasa dari orang lain.
- e) Membiasakan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- f) Berani mengakui kesalahan yang telah dilakukan dan meminta maaf.

- g) Mengingatkan dan menegur teman yang melalaikan tata tertib, melanggar hukum agama, norma masyarakat dengan cara bijaksana.

7) Larangan

- a) Membawa rokok/merokok dan main kartu judi di lingkungan sekolah dan selama masih memakai seragam sekolah.
- b) Membawa dan minum minuman keras dan sejenisnya/minuman oplosan.
- c) Membawa senjata tajam, senpi, atau sejenisnya.
- d) Membawa/menjual/memakai napsa (narkotika, psikotropika, zat adiktif) dan obat-obat terlarang lainnya.
- e) Membawa sepeda motor ke sekolah.
- f) Membawa *Tipe-X*, *Handphone*, *Mp4*, *I-Pad*, dan sejenisnya ke sekolah.
- g) Berkelahi baik perorangan maupun kelompok.
- h) Mengompas/malak, berjudi, mencuri, dan perbuatan lainnya yang merugikan orang lain dan melanggar hukum.
- i) Mencoret dan mengotori tembok/dinding sekolah, meja kursi, buku pinjaman perpustakaan, dan bangunan sekolah lainnya.
- j) Melompat pagar sekolah/jendela kelas.
- k) Membawa buku/majalah/*VCD*/gambar porno dan sejenisnya.
- l) Membawa uang dan barang berharga secara berlebihan.
- m) Memakai perhiasan atau aksesoris bagi siswa putra.

- n) Memakai perhiasan atau aksesoris yang mencolok bagi siswa putri.
- o) Berpacaran atau berbuat asusila di lingkungan sekolah dan di luar sekolah selama memakai seragam sekolah.
- p) Berbicara kotor, mengumpat, menghina atau menyapa antar sesama siswa, guru, dan warga sekolah dengan kata, sapaan, dan panggilan yang tidak sopan.
- q) Berpakaian tidak sopan, bersolek, dan berkuku panjang.
- r) Memakai jaket/*sweater* di kelas, dan di lingkungan sekolah kecuali ada izin dari guru.
- s) Bermain sepak bola di dalam kelas dan di halaman sekolah selain pada saat jam olahraga.
- t) Merayakan ulang tahun, syukuran kenaikan kelas, kelulusan secara berlebihan seperti menyiram air, bedak/tepung, telur, dan lain-lain yang dapat mengganggu kebersihan/ketertiban sekolah.
- u) Berambut gondrong (ukuran rambut maksimal 2 cm (samping), maksimal 3 cm (belakang), maksimal 4 cm (atas)), disemir, bertato, dan menindik anggota badan bagi siswa putra.
- v) Berambut panjang melewati bahu diurai. disemir, bertato, dan menindik anggota badan selain telinga bagi siswa putri.
- w) Membuang sampah tidak pada tempatnya.

8) Pelanggaran dan konsekuensi

Siswa yang melanggar ketentuan tata tertib dan tata krama dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a) Teguran secara lisan setiap kali melakukan pelanggaran.
- b) Pembinaan dari wali kelas, guru BK, dan kesiswaan.
- c) Peringatan langsung kepada siswa dilakukan sebanyak 3 kali
- d) Peringatan tertulis kepada siswa dan orang tua.
- e) Panggilan orangtua.
- f) Pemberian konsekuensi tindakan siswa yang diputuskan oleh sekolah sesuai dengan tingkat pelanggaran.
- g) Dikembalikan kepada orangtua.

Dari tata tertib, tata krama dan larangan yang diterapkan di SMP Negeri 7 Yogyakarta di atas, tidak ada yang memberatkan siswa atau membuat siswa merasa tidak nyaman dengan ketentuan yang dibuat oleh pihak sekolah. pernyataan tersebut berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan siswa yang mengatakan bahwa siswa tidak keberatan dengan tata tertib maupun larangan yang ditentukan oleh sekolah. Tata tertib dibuat juga memperhatikan hak anak di sekolah karena siswa dilibatkan dalam membuat tata tertib, tata krama maupun larangan dan konsekuensi. Sehingga tata tertib dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Pelanggaran dan konsekuensi yang ditetapkan oleh pihak sekolah juga tidak menerapkan hukuman fisik maupun hukuman non fisik yang merugikan siswa dari segi psikis.

Konsekuensi dari setiap pelanggaran yang ada yaitu dengan peringatan maupun pembinaan kepada siswa atas tindakan yang dilakukan oleh siswa. Konsekuensi terberat yang harus ditanggung oleh siswa yaitu dikembalikannya siswa kepada orang tua.

2. Deskripsi data hasil penelitian

a. Partisipasi siswa dalam pendidikan lingkungan hidup (PLH) di SMP N 7 Yogyakarta

Pendidikan lingkungan merupakan salah satu faktor penting untuk meminimalisasi kerusakan lingkungan hidup dan merupakan sarana yang penting dalam menghasilkan Sumber daya manusia yang dapat melaksanakan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pendidikan lingkungan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat dalam mencari pemecahan dan pencegahan timbulnya masalah lingkungan.

Menyikapi perihal kerusakan lingkungan dan sumber daya alam, perlu adanya pengetahuan dan keterampilan yang bersifat langsung aplikasi dalam kehidupan sehari-hari serta menjadi pola tindak dan pola pikir untuk penanganan yang lebih spesifik pada permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia umumnya, khususnya di SMP N 7 Yogyakarta, yang selama ini memiliki masalah yang paling urgensi yaitu penanganan sampah, polusi, air limbah, dan lain-lainnya.

Pendidikan Lingkungan Hidup merupakan pengetahuan, kajian, bahan materi pelajaran yang berupaya untuk mendidik siswa Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Ibtidaiyah untuk

memahami dan mempraktikkan langsung cara penanganan masalah-masalah lingkungan tersebut yang selama ini menjadi permasalahan dunia. Siswa-siswi SMP adalah calon-calon penerus bangsa yang akan hidup di masa mendatang dan akan menghadapi tantangan kehidupan yang tinggi dengan segala dilematisasi yang sangat kompleks.

Pada penelitian Partisipasi Siswa di SMP N 7 Yogyakarta berupa kontribusi dalam tim siswa yang berjumlah sebanyak 40 orang siswa. 40 orang siswa tersebut diajak untuk bereksplorasi tentang masalah lingkungan di sekitar SMP N 7 Yogyakarta serta solusinya.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan di SMP N 7 Yogyakarta tentang bentuk sosialisasi Pendidikan Lingkungan Hidup di kalangan siswa adalah sebagai berikut:

“Bentuk sosialisasi pendidikan lingkungan hidup di kalangan siswa yaitu diantaranya berupa program pilot project dari suatu organisasi dari Jerman. Selain itu juga masih banyak lagi program sosialisasi tentang pendidikan lingkungan hidup di kalangan siswa.” (Wawancara dengan Guru di SMP N 7 Yogyakarta)

“Adanya suatu program membawa bekal makanan untuk setiap siswa dan ada program ceklis kelas.” (Wawancara dengan Siswa di SMP N 7 Yogyakarta)

Berdasarkan hasil di atas, program pendidikan lingkungan di SMP N 7 Yogyakarta sudah ada yang diberi nama dengan program Ekomepi, sedangkan bentuk-bentuk sosialisasi Pendidikan Lingkungan Hidup di SMP N 7 Yogyakarta yaitu dengan membentuk 40 siswa diajak untuk mengetahui dan menemukan permasalahan-permasalahan lingkungan yang ada di SMP N 7 Yogyakarta. Pertamadi mulai dari

sampahnya, energinya, airnya, sanitasinya dan sebagainya itu, kemudian diajak untuk mencari solusi dari permasalahan yang ditemui.

Segala bentuk-bentuk sosialisasi Pendidikan Lingkungan Hidup di SMP N 7 Yogyakarta harus dibarengi upaya untuk melaksanakan kegiatan tersebut agar program yang sudah dicanangkan sekolah untuk mengenalkan Pendidikan Lingkungan Hidup kepada siswa dapat berjalan dengan baik dan siswa dapat mengetahui manfaat dari program tersebut.

b. Implementasi siswa dalam pendidikan lingkungan hidup (PLH) di SMP N 7 Yogyakarta

Adapun hasil wawancara yang dilakukan di SMP N 7 Yogyakarta tentang bentuk implementasi Pendidikan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

“Implementasi pendidikan lingkungan hidup ini juga terjadi di dalam siswa yang memberikan atau menumbuhkan virus baik pada anak untuk menjadi kader bagi siswa semua. Kader disini mempunyai tugas untuk menyebarkan kepada anak-anak yang lainnya.” (Wawancara dengan Guru di SMP N 7 Yogyakarta).

“adanya suatu kantor bank untuk mewujudkan adanya suatu implementasi pendidikan lingkungan hidup” (Wawancara dengan Siswa di SMP N 7 Yogyakarta).

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi Pendidikan Lingkungan Hidup di SMP N 7 Yogyakarta yaitu dengan cara 1) mengurangi sampah dengan cara dengan menyuruh siswa dengan membawa bekal sendiri-sendiri, 2) memilih sampah-sampah yang termasuk organik dan non organik, untuk sampah non

organic seperti botol dikumpulkan dimasing-masing kelas kemudian semua dikumpulkan ke dalam bank sampah untuk dilakukan daur ulang.

Sedangkan dari hasil wawancara di atas, partisipasi siswa dalam implementasi Pendidikan Lingkungan hidup adalah 1) membuang sampah pada tempatnya khususnya botol dikumpulkan ke dalam plastik besar apabila sudah penuh kemudian di taruh ke dalam bank sampah yang kemudian untuk dijual untuk dilakukan daur ulang, 2) membuat ceklis kelas pada masing-masing kelas kemudian ada tim yang mengecek langsung pada masing-masing kelas setiap harinya, tim akan menilai setiap harinya kelas mana yang terbersih kemudian akan dilaporkan atau diberitahukan setiap seminggu sekali, atau paling tidak sebulan sekali pada saat upacara bendera. Untuk kelas terbersih akan diberikan reward, sehingga akan memotivasi kelas-kelas lainnya untuk menjadi kelas yang paling terbersih.

Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan Hidup di SMP N 7 Yogyakarta harus di dukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Adapun hasil wawancara yang di lakukan di SMP N 7 Yogyakarta tentang Sarana Prasarana Pendidikan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

“Adanya kantong-kantong plastik dan bagor.” (Wawancara dengan Guru di SMP N 7 Yogyakarta).

“Adanya drum tempat sampah, serta gerobak dorongan yang tinggi.” (Wawancara dengan Guru di SMP N 7 Yogyakarta).

“Sudah ada tempat sampah organik dan sampah non organik hanya belum semua kelas ada.” (Wawancara dengan Siswa SMP N 7 Yogyakarta).

Berdasarkan wawancara di atas sarana dan prasarana difasilitasi dari Badan Lingkungan Hidup berupa pembagian kantong-kantong plastik, bagor (karung), drum besar yang terbuat dari besi ada yang bias didorong ada yang tidak bias didorong.

Sedangkan partisipasi siswa dalam implementasi kebijakan PLH (Pendidikan Lingkungan Hidup) meliputi:

1) Partisipasi siswa dalam implementasi kebijakan PLH (Pendidikan Lingkungan Hidup) pada aspek tujuan.

Adapun hasil wawancara yang di lakukan di SMP N Yogyakarta tentang partisipasi siswa dalam implementasi kebijakan PLH (Pendidikan Lingkungan Hidup) pada aspek Tujuan adalah sebagai berikut:

“Partisipasi yang dilakukan oleh siswa dalam hal ini yaitu ikut mengelola sampah yang ada di lingkungan sekolah.” (Wawancara dengan Guru di SMP N 7 Yogyakarta).

“Mengajak siswa untuk selalu peduli terhadap lingkungan dengan menjaga dan merawat lingkungan sekitar sekolah mauapun di luar sekolah.” (Wawancara dengan Guru di SMP N 7 Yogyakarta).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi siswa dalam implementasi kebijakan PLH (Pendidikan Lingkungan Hidup) pada aspek Tujuan yaitu mengajak terutama dalam hal ini adalah warga sekolah untuk

lebih peduli terhadap lingkungan sekitarnya yang mana efeknya sudah terjadi dengan bentuk perubahan iklim.

2). Partisipasi siswa dalam implementasi kebijakan PLH (Pendidikan Lingkungan Hidup) pada aspek badan pelaksana.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan di dapatkan bahwa Partisipasi siswa dalam implementasi kebijakan PLH (Pendidikan Lingkungan Hidup) pada aspek badan pelaksana yang menunjang implementasi kebijakan PLH (Pendidikan Lingkungan Hidup) adalah komite sekolah atau pihak sekolah, Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Pendidikan. Dari pihak sekolah sendiri terdapat 2 tim yang mana tim dari guru diketuai oleh Ibu Pur dan tim siswa yang terdiri atas 40 orang. Seperti yang terdapat pada kutipan wawancara dibawah ini:

“Sejauh ini partisipasi siswa belum maksimal dalam badan yang melaksanakan pendidikan lingkungan hidup.” (Wawancara dengan Siswa di SMP N 7 Yogyakarta).

“Sudah terbentuk tim, namun belum ada komunikasi sama sekali dari dulu sampai sekarang” (Wawancara dengan Guru di SMP N 7 Yogyakarta).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi siswa dalam implementasi kebijakan PLH (Pendidikan Lingkungan Hidup) pada aspek badan pelaksana meliputi dari komite sekolah, Dinas Pendidikan dan Badan Lingkungan Hidup.



Gambar 6 & 7. Rapat Siswa

Pada 2 gambar di atas dapat dilihat kinerja dari tim PLH yang terdiri dari siswa dan guru sedang berdiskusi.

3). Partisipasi siswa dalam implementasi kebijakan PLH (Pendidikan Lingkungan Hidup) pada aspek dampak.

Berdasarkan observasi peneliti dampak dari implementasi kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup di lingkungan SMP N 7 Yogyakarta sudah terasa dimana banyak tanaman tumbuhan baik sebagai peneduh atau sebagai hiasan.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan di SMP N 7 Yogyakarta tentang partisipasi siswa dalam implementasi

kebijakan PLH (Pendidikan Lingkungan Hidup) pada aspek dampak adalah sebagai berikut:

“Berdampak positif artinya siswa menjalankan dengan baik dan memberi contoh yang baik pula.” (Wawancara dengan Kepala Sekolah di SMP N 7 Yogyakarta).

“Dapat dilihat dari penghijauan di sekolah ini tidak lepas dari kegiatan siswa yang peduli dengan lingkungan sekolah” (Wawancara dengan Guru di SMP N 7 Yogyakarta).

“Hanya terjadi beberapa dampak tidak mempengaruhi semua pihak namun mengarah ke lebih baik.” (Wawancara dengan Siswa di SMP N 7 Yogyakarta).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi siswa dalam implementasi kebijakan PLH (Pendidikan Lingkungan Hidup) pada aspek dampak yang dirasakan adalah dengan diadakan penanaman pohon dapat mengurangi teriknya matahari dan dapat mengurangi sampah-sampah dan bau-bau yang tak sedap disekitar lokasi.



Gambar 8. Lorong Kelas



Gambar 9. Halaman Sekolah



Gambar 10. Halaman Taman

Dapat dilihat dari ketiga gambar diatas dimana pembangunan infrasturuktur sekolah yang baru dalam hal ini tangga dibarengi dengan jumlah tanaman yang banyak.

4). Partisipasi siswa dalam implementasi kebijakan PLH (Pendidikan Lingkungan Hidup) pada aspek sikap.

Berdasarkan hasil observasi peneliti pada aspek sikap terlihat siswa serta guru maupun warga sekolah SMP N 7 Yogyakarta sangat menjaga keasrian serta kebersihan lingkungan di mana sekolah tampak bersih serta pada beberapa

waktu terlihat siswa membersihkan atau membuang sampah di tempatnya.

Adapun hasil wawancara yang di lakukan di SMP N 7 Yogyakarta tentang partisipasi siswa dalam implementasi kebijakan PLH (Pendidikan Lingkungan Hidup) pada aspek sikap adalah sebagai berikut:

“Sudah ada siswa yang menyikapi dengan baik namun juga masih ada siswa yang belum menyikapi secara baik.” (Wawancara dengan Siswa di SMPN 7 Yogyakarta).

“Untuk siswa yang menyikapi dengan baik itu dapat menambah pengetahuan tentang lingkungan hidup.” (Wawancara dengan Siswa di SMPN 7 Yogyakarta).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi siswa dalam implementasi kebijakan PLH (Pendidikan Lingkungan Hidup) pada aspek sikap adalah dapat mengenalkan siswa kepada lingkungan agar dapat menjaga kebersihan serta memelihara lingkungan sekitar agar tetap asri.



Gambar 11. Aktivitas Rutin dalam Implementasi PLH



Gambar 12. Aktivitas Rutin dalam Implementasi PLH

Tampak pada 2 gambar di atas siswa sedang membersihkan atau menyapu di tempat bermain bola ping pong dan tampak pula guru yang sedang memungut sampah plastik pada pot tanaman.

5). Partisipasi siswa dalam implementasi kebijakan PLH (Pendidikan Lingkungan Hidup) pada aspek sumber daya.

Berdasarkan pengamatan observasi peneliti sumber daya di sekolah sebenarnya cukup namun alangkah baiknya tidak mengandalkan dari sumbangan BLH, orang tua , maupun masyarakat.

Adapun hasil wawancara yang di lakukan di SMP N 7 Yogyakarta tentang partisipasi siswa dalam implementasi kebijakan PLH (Pendidikan Lingkungan Hidup) pada aspek Sumber Daya adalah sebagai berikut:

“Sudah cukup baik partisipasi siswanya dalam sumberdaya pengimplementasian pendidikan lingkungan hidup di sekolah.”(Wawancara dengan Kepala Sekolah di SMP N 7 Yogyakarta).

“Sudah didukung dengan siswa yaitu siswa membawa bekal sendiri dari rumah” (Wawancara dengan Guru di SMP N 7 Yogyakarta).

“Tertib dan disiplin karena ada 40 anak untuk mengkoordinir semuanya” (Wawancara dengan Siswa di SMP N 7 Yogyakarta).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi siswa dalam implementasi kebijakan PLH (Pendidikan Lingkungan Hidup) pada aspek Sumber Daya diperlukan adanya dukungan dari orangtua agar anaknya di sekolah agar tidak jajan dan juga dengan tidak jajan akan membuat sistem kekebalan anak menjadi lebih baik selain juga dapat mengurangi sampah-sampah dari produk-produk kemasan yang dibeli siswa.



Gambar 13. Bank Sampah



Gambar 14. Gerobak Sampah

Tampak dalam 2 foto diatas pada gambar pertama adalah bak sampah sesuai golongan dan yang kedua adalah kereta angkut untuk sampah yang mana keduanya adalah sumbangan dari BLH.

6). Partisipasi siswa dalam implementasi kebijakan PLH (Pendidikan Lingkungan Hidup) pada aspek komunikasi.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan di SMP N 7 Yogyakarta tentang partisipasi siswa dalam implementasi kebijakan PLH (Pendidikan Lingkungan Hidup) pada aspek Komunikasi adalah sebagai berikut:

“Komunikasi tentang pendidikan lingkungan hidup biasanya disangkut pautkan pada setiap pembelajaran”. (Wawancara dengan Guru di SMP N 7 Yogyakarta).

“Ada grup WA antara guru dengan siswa sehingga komunikasi berjalan dengan baik”. (Wawancara dengan Siswa SMPN 7 Yogyakarta.)

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi siswa dalam implementasi kebijakan PLH

(Pendidikan Lingkungan Hidup) pada aspek komunikasi sudah terjalin dengan baik. Di dalam maupun di luar kelas dan juga terjalin juga secara non fisik dengan menggunakan *social media*.

c. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan PLH (Pendidikan Lingkungan Hidup) di SMP N 7 Yogyakarta

Adapun hasil wawancara yang dilakukan di SMP N Yogyakarta tentang partisipasi siswa dalam implementasi kebijakan PLH (Pendidikan Lingkungan Hidup) pada faktor pendukung serta faktor penghambat adalah sebagai berikut:

“Faktor pendukungnya yaitu sampah banyak yang gampang diolah serta lingkungan sudah hijau.” (Wawancara dengan Guru SMP 7 Yogyakarta).

“Pemberian dari BLH berupa kantong-kantong plastik dan bagor.” (Wawancara dengan Guru SMP 7 Yogyakarta).

“Dukungan dari orang tua siswa berupa membakan bekal kepada anaknya ketika pergi sekolah”. (Wawancara dengan Guru SMP 7 Yogyakarta).

“Banyak siswa yang sudah mau menjaga lingkungan.” (Wawancara dengan Siswa di SMP N 7 Yogyakarta).

Beberapa wawancara dengan sumber di atas menyebutkan mengenai faktor pendukung sedangkan sumber di bawah menyebutkan tentang faktor penghambat, yaitu:

“Tugas-tugas Guru serta jam mengajar wajib adalah salah satu faktor penghambat.” (Wawancara dengan Guru SMP N 7 Yogyakarta).

“Adanya dukungan dari orang tua merupakan salah satu faktor

pendukung dalam pengimplementasian.” (Wawancara dengan Guru SMP N 7 Yogyakarta).

“Kesadaran diri siswa itu juga menghambat implementasi pendidikan lingkungan hidup.” (Wawancara dengan Kepala Sekolah SMP N 7 Yogyakarta).



Gambar 15. Memilah Sampah

B. Pembahasan

1. Partisipasi siswa dalam Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) di SMP N 7 Yogyakarta

Sekolah yang tidak mengajarkan pendidikan lingkungan kepada siswa tidak akan merubah situasi dan kondisi lingkungan yang rusak menjadi baik dalam waktu yang singkat, melainkan membutuhkan waktu, proses, dan sumber daya. Atas dasar itulah Pendidikan lingkungan sedini mungkin perlu diupayakan agar dapat meminimalisasi kerusakan-kerusakan lingkungan. Sebagai contoh dengan adanya bencana lingkungan hidup seperti bencana kebakaran hutan yang tak terkendali dari tahun ke tahun yang diakibatkan dari peran manusia pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan. Dengan adanya pendidikan lingkungan merupakan upaya

memperkenalkan siswa sekolah pada lingkungan sebenarnya yang sudah ada dalam program 5K, Keindahan, Kerapian, Kebersihan, Kepribadian dan Keamanan (Nugroho, 2007).

Pada penelitian Partisipasi Siswa di SMP N 7 Yogyakarta berupa kontribusi dalam tim siswa yang berjumlah sebanyak 40 orang siswa. 40 orang siswa tersebut diajak untuk bereksplorasi tentang masalah lingkungan di sekitar SMP N 7 Yogyakarta serta solusinya. Mengacu pada tangga partisipasi apa yang terjadi SMP N 7 Yogyakarta berada pada tangga *tokenisme* di mana dalam hal ini siswa sudah dijadikan tim yang bias menyuarakan pendapatnya atau suaranya namun belum memiliki hak untuk mengambil keputusan serta kebijakan yang mana hal itu masih menjadi milik sekolah. Dengan demikian dapat digolongkan bahwa partisipasi siswa SMPN 7 Yogyakarta ke dalam hierarki ketiga Partisipasi yaitu *Engagement* yang pada prakteknya orang tua siswa serta sekolah dalam suasana yang saling menghormati dan saling mendukung.

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan bahwa partisipasi siswa dalam implementasi Pendidikan Lingkungan hidup adalah 1) membuang sampah pada tempatnya khususnya botol dikumpulkan ke dalam plastik besar apabila sudah penuh kemudian di taruh ke dalam bank sampah yang kemudian untuk dijual untuk dilakukan daur ulang, 2) membuat ceklis kelas pada masing-masing kelas kemudian ada tim yang mengecek langsung pada masing-masing kelas setiap harinya, tim akan menilai setiap harinya kelas mana yang terbersih kemudian akan dilaporkan atau

diberitahukan setiap seminggu sekali, atau paling tidak sebulan sekali pada saat upacara bendera. Untuk kelas terbersih akan diberikan reward, sehingga akan memotivasi kelas-kelas lainnya untuk menjadi kelas yang paling terbersih.

Sedangkan bentuk implementasi Pendidikan Lingkungan Hidup di SMP N 7 Yogyakarta yaitu dengan cara 1) mengurangi sampah dengan cara dengan menyuruh siswa dengan membawa bekal sendiri-sendiri, 2) memilih sampah-sampah yang termasuk organik dan non organik, untuk sampah non organik seperti botol dikumpulkan dimasing-masing kelas kemudian semua dikumpulkan ke dalam bank sampah untuk dilakukan daur ulang.

Selain itu juga untuk menumbuhkan partisipasi siswa dalam Pendidikan Lingkungan Hidup, Guru PLH khususnya dan bahkan semua guru memiliki peran penting di dalam mensukseskan program PLH di sekolah, membangun gaya hidup, menanamkan prinsip-prinsip, dan menerapkan etika lingkungan hidup. Upaya agar guru mencapai tujuan. Menurut Wrightman (dalam Usman, 2008:4) peranan guru adalah terciptanya serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan yang dilakukan dalam suatu situasi tertentu serta berhubungan dengan kemajuan perubahan tingkah laku dan perkembangan siswa yang menjadi tujuannya. Guru adalah pendidik, yang menjadi tokoh dan panutan bagi para peserta didik, dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas tertentu, yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri dan

disiplin. Peran guru sebagai pendidik merupakan peran yang berkaitan dengan tugas memberi bantuan dan dorongan, pembinaan serta tugas-tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan anak agar menjadi patuh terhadap aturan-aturan sekolah, keluarga dan masyarakat.

Guru di SMP N 7 Yogyakarta memiliki peran yang penting dalam setiap kegiatan di sekolah, karena mereka dapat mendorong siswa untuk memperluas kemampuan dalam menerapkan prinsip-prinsip dan etika lingkungan hidup dengan memberikannya contoh. Prosedur ini merupakan suatu metode pembelajaran yang menekankan pada keterlibatan siswa agar mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Dulu, guru berperan sebagai penyampai materi ajar dan merupakan satu-satunya sumber belajar. Namun kini guru sudah berubah peran menjadi pembimbing, pembina, pengajar, dan pelatih. Beratnya tanggung jawab bagi guru menyebabkan pekerjaan guru harus memerlukan keahlian khusus. Untuk itu pekerjaan guru tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang pendidikan.

Dapat disimpulkan peran guru sebagai pembimbing dalam penelitian ini adalah memberi tekanan kepada tugas, memberikan bantuan kepada siswa dalam pemecahan masalah yang dihadapinya. Sehingga dapat mendorong siswa untuk memperluas kemampuan dalam menerapkan prinsip-prinsip dan etika lingkungan hidup dengan memberikannya contoh.

Selain itu juga pembelajaran di luar ruang akan membawa peserta didik dapat berintegrasi dengan alam. Alam akan membuka cakrawala pandang siswa lebih luas. Metode ini juga diharapkan dapat menjalin keselarasan antara materi pembelajaran dengan lingkungan sekitar. Para siswa diharapkan dapat menimba ilmu secara langsung dari pengalaman nyata yang ada, sehingga materi pembelajaran lebih mudah dipahami dan diingat untuk jangka panjang (Susapti, 2010). Pembelajaran di alam terbuka dapat membebaskan siswa dalam mengeksplorasi kreativitas dan daya pikir anak dimana anak merasa selalu *fun* tanpa merasa anak sedang belajar materi pelajaran. Dengan pemandangan alam sekitar yang masih asri, memberikan lingkungan belajar yang *fresh*. Sehingga anak bisa belajar sambil menikmati keindahan alam.

2. Implementasi siswa dalam Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) di SMP N 7 Yogyakarta

a. Tujuan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan. Van Meter dan Van Horn mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para

pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustrated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana (*implementors*). Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang “*crucial*”. *Implementors* mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Mater dan Van Horn, 1974).

Ukuran dan tujuan kebijakan diperlukan untuk mengarahkan dalam melaksanakan kebijakan, hal tersebut dilakukan agar sesuai dengan program yang sudah direncanakan. Dalam hal ini tujuan dari Pendidikan Lingkungan Hidup adalah mengajak terutama dalam hal ini adalah warga sekolah untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitarnya yang mana efeknya sudah terjadi dengan bentuk perubahan iklim. Setelah peduli kemudian akan diberi pengarahan lebih lanjut mengenai cara pengolahan sampah agar bisa digunakan kembali jika dimungkinkan. Tujuan lainnya dari pendidikan lingkungan hidup selain untuk menjaga iklim sekolah adalah untuk melatih karakter siswa

untuk lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah dan untuk memberi pemahaman kepada siswa pada efek efek yang ditimbulkan oleh manfaat yang muncul dari lingkungan tersebut. Agar terbentuk kultur siswa yang peduli terhadap lingkungan dan manfaat dari peduli lingkungan itu sendiri. Disamping itu kepedulian siswa akan juga membantu implementasi PLH di SMP N 7 Yogyakarta.

b. Badan Pelaksana

Keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari sifat atau ciri-ciri badan/instansi pelaksana kebijakan. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para badan atau instansi pelaksananya.

Subarsono mengungkapkan kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri dari para aktor, kualitas tersebut adalah tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja, dan integritas moralnya (Subarsono, 2006: 7). Komponen dari model ini terdiri dari struktur-struktur formal dari organisasi-organisasi dan atribut-atribut yang tidak formal dari personil mereka, disamping itu perhatian juga perlu ditujukan kepada ikatan-ikatan badan pelaksana dengan pameran-pameran serta dalam penyampaian kebijakan. Dalam hal ini di SMP N 7 Yogyakarta terdapat tim dari siswa yang terdiri dari 40 siswa dan tim dari guru yang diketuai Ibu Pur dan dibantu oleh Badan Lingkungan Hidup serta turut serta Dinas

Pendidikan Kota Yogyakarta. Namun yang menjadi masalah disini adalah tim dari siswa tidak dapat menentukan kebijakan maupun langkah langkah yang tidak disetujui oleh pihak sekolah. Hal ini diakibatkan karena siswa hanya eksekutor atau pelaksana dengan kata lain siswa tidak mempunyai hak untuk menentukan kebijakan.

c. Dampak

Van Meter dan Vanhorn mengungkapkan bahwa, “Sejauh mana lingkungan eksternal ikut mendukung keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan, lingkungan eksternal tersebut adalah ekonomi, sosial, dan politik dukungan sumber daya ekonomi dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan dan dalam lingkungan politik dukungan elite politik sangat diperlukan dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan” (Meter dan Vanhorn, 1975: 471). Jika dikomparasikan dengan kondisi di SMP N 7 Yogyakarta pada aspek dampak yang dirasakan adalah dengan diadakan penanaman pohon dapat mengurangi teriknya matahari dan dapat mengurangi sampah-sampah dan bau-bau yang tak sedap disekitar lokasi. Namun dalam pelaksanaan masih terdapat pihak yang belum tersentuh oleh dampak dari Implementasi PLH di SMP N 7 Yogyakarta. Hal itu bukan menjadi penghambat yang besar karena dilihat hasil observasi peneliti tidak melihat hal itu sebagai masalah yang besar dan dapat mengganggu proses implementasi PLH di SMP N 7 Yogyakarta.

d. Sikap

Sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas dan sifat demokratis. Implementor baik harus memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Implementasi kebijakan apabila memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasinya menjadi tidak efektif dan efisien. Wahab (2010), menjelaskan bahwa disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila *implementor* memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Walaupun ada perbedaan dalam menyikapi Implementasi PLH di SMP N 7 Yogyakarta namun dalam tujuannya tetap sama yaitu untuk menyelesaikan Implementasi PLH di SMP N 7 Yogyakarta. Hanya saja dengan perspektif warga sekolah yang berbeda-beda yang dilatarbelakangi pemikiran individu yang berbeda dalam menyikapi dan melihat implementasi PLH di SMP N 7 Yogyakarta.

e. Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan

keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Derthicks (dalam Van Mater dan Van Horn, 1974) bahwa: *"New town study suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program"*.

Van Mater dan Van Horn (dalam Widodo 1974) menegaskan bahwa: "Sumber daya kebijakan (*policy resources*) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan."

Dalam penelitian di SMP N 7 Yogyakarta ini para siswa berpartisipasi sebagai sumber daya utamanya 40 siswa yang terdapat pada tim. Dalam perjalanan Implementasinya sekolah turut dibantu oleh BLH berupa penunjang seperti bak sampah dan gerobak sampah.

Hal ini menurut peneliti sangat membantu proses implementasi PLH di SMP N 7 Yogyakarta karena bantuan yang diberikan merupakan hal penting dalam Implementasi PLH di SMP N 7 Yogyakarta.

f. Komunikasi

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Mater apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi.

Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan. Dalam suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan komplek.

Proses pentransferan berita kebawah di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami gangguan (*distortion*) baik yang disengaja maupun tidak. Jika sumber komunikasi berbeda memberikan interpretasi yang tidak

sama (*inconsistent*) terhadap suatu standar dan tujuan, atau sumber informasi sama memberikan interpretasi yang penuh dengan pertentangan (*conflicting*), maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif.

Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (*accuracy and consistency*). Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan.

Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya. Jika dikomparasikan dengan hasil penelitian di SMP N 7 Yogyakarta pada aspek komunikasi yang ada adalah dengan sudah berjalan dengan baik walaupun secara non fisik utamanya menggunakan *social media*. Meskipun komunikasi berjalan dengan baik melalui social media dalam pandangan peneliti melihat komunikasi berjalan sebaliknya ketika berada dilapangan menurut pengakuan siswa yang berada dalam tim PLH. Siswa dalam tim PLH kurang informasi dari tim guru mengenai implementasi PLH di SMP N 7 Yogyakarta sehingga membuat komunikasi yang kurang baik tim siswa dan tim guru.

2. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) di SMP N 7 Yogyakarta

Berdasarkan hasil wawancara hasil penelitian, diperoleh informasi bahwa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) adalah sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung

- 1) Kesadaran siswa dalam hidup bersih dalam kehidupan sehari-hari.
- 2) Dukungan dari sekolah yang memberikan *reward* kepada kelas yang terbersih agar memotivasi kelas lainnya untuk melakukan hal serupa.
- 3) Pemberian bantuan dari Badan Lingkungan Hidup berupa kantong plastik, bagor dan drum yang terbuat dari bersih agar sampah dapat dibuang pada tempat tersebut.
- 4) Dukungan orang tua agar membawakan bekal kepada anaknya.
- 5) Dukungan sekolah meskipun belum berjalan secara efektif.

b. Faktor Penghambat

- 1) Belum 100% siswa mempunyai kesadaran agar berperilaku hidup bersih.
- 2) Pihak sekolah tidak mempunyai cadangan kantong plastik dan bagor sebagai pengganti.
- 3) Kurangnya komunikasi antara siswa dengan pihak sekolah.
- 4) Belumnya 100% dukungan/*support* orangtua kepada siswa agar membawa bekal ketika pergi sekolah.

5) Belum berjalannya efektif program kebersihan yang telah diprogramkan oleh pihak sekolah.

Ashari (2008) menegaskan hubungan kerjasama sekolah dengan masyarakat bisa berjalan dengan baik apabila didukung oleh beberapa faktor, yakni: (1) adanya program dan perencanaan yang sistematis, (2) tersedianya basis dokumentasi yang lengkap, (3) tersedianya tenaga ahli, terampil, sarana serta dana yang memadai, (4) kondisi organisasi sekolah yang memungkinkan untuk meningkatkan hubungan sekolah dengan masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Partisipasi siswa dalam implementasi Pendidikan Lingkungan hidup di SMP N 7 Yogyakarta berada pada tangga *tokenisme* yaitu siswa sudah memiliki hak menyuarakan pendapat namun belum memiliki hak untuk mengambil serta memutuskan kebijakan dan pada hierarki berada di tingkat *engagement* yaitu orang tua siswa serta sekolah dalam suasana saling menghormati dan saling mendukung partisipasi siswa. Sedang dalam kegiatannya partisipasi siswa bisa digolongkan sebagai sumber daya non material seperti 1) membuang sampah pada tempatnya khususnya botol dikumpulkan ke dalam plastik besar apabila sudah penuh kemudian di taruh ke dalam bank sampah yang kemudian untuk dijual untuk dilakukan daur ulang, 2) membuat ceklis kelas pada masing-masing kelas kemudian ada tim yang mengecek langsung pada masing-masing kelas setiap harinya, tim akan menilai setiap harinya kelas mana yang terbersih kemudian akan dilaporkan atau diberitahukan setiap seminggu sekali, atau paling tidak sebulan sekali pada saat upacara bendera. Untuk kelas terbersih akan diberikan reward, sehingga akan

memotivasi kelas-kelas lainnya untuk menjadi kelas yang paling terbersih.

Sedangkan implementasi Pendidikan Lingkungan Hidup di SMP N 7 Yogyakarta dalam 6 aspek yaitu 1) aspek tujuan dengan terlatihnya karakter siswa yang bertanggung jawab akan membantuk kebijakan PLH berjalan dengan baik, 2) aspek badan pelaksana dengan dibentuknya tim siswa tersebut dapat menyuarakan pendapatnya namun belum dapat memutuskan kebijakan, 3) aspek dampak dengan berjalannya PLH dirasakan perubahan yang baik dalam lingkungan sekolah walaupun belum berdampak kepada seluruh warga sekolah, 4) aspek sikap dengan perspektif warga sekolah berbeda-beda dalam menyikapi dan melihat implementasi PLH, 5) aspek sumber daya dengan didapatnya bantuan dari BLH sangat membantu dalam proses implementasi PLH, 6) aspek komunikasi dengan adanya social media komunikasi berjalan lancar meski komunikasi secara fisik kurang.

2. Faktor pendukung partisipasi siswa dalam implementasi PLH yaitu 1) kesadaran siswa dalam hidup bersih dalam kehidupan sehari-hari, 2) dukungan dari sekolah yang memberikan reward kepada kelas yang terbersih agar memotivasi kelas lainnya untuk melakukan hal serupa, 3) pemberian bantuan dari Badan Lingkungan Hidup berupa kantong plastik, bagor dan drum yang terbuat dari bersih agar sampah dapat dibuang pada tempat tersebut 4) dukungan orang tua agar membawakan bekal kepada anaknya 5) dukungan sekolah meskipun belum berjalan

secara efektif. Faktor penghambat partisipasi siswa dalam implementasi PLH yaitu 1) belum seluruh siswa mempunyai kesadaran agar berperilaku hidup bersih, 2) pihak sekolah tidak mempunyai cadangan sarana dan prasarana kebersihan, 3) kurangnya komunikasi antara siswa dengan pihak sekolah, 4) dukungan/*support* orangtua belum optimal kepada siswa agar membawa bekal ketika pergi sekolah

B. Saran

Berdasarkan simpulan, maka peneliti menyarankan sebagai berikut:

1. Pihak sekolah hendaknya mempererat kerjasama dengan orangtua siswa agar siswa ikut menerapkan di rumah perilaku ramah lingkungan yang dibudayakan di sekolah. Pihak sekolah hendaknya lebih mengintegrasikan lagi kegiatan siswa di sekolah dengan memanfaatkan fasilitas lingkungan yang ada di sekolah dengan maksimal. Keikutsertaan siswa dalam aksi/ organisasi kelingkungan yang diadakan oleh pihak luar juga hendaknya dipantau, sehingga siswa terbiasa berkerjasama dengan masyarakat/ pihak luar sekolah.
2. Partisipasi siswa pada pengelolaan lingkungan tempat tinggal diharapkan dapat difasilitasi oleh orangtua. Seperti, disediakan tempat sampah berdasarkan jenisnya di rumah agar siswa terbiasa dengan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya.

3. Saran untuk instansi pendidikan lain, dapat menjadi model bagi sekolah lain dalam mengimplementasikan Pendidikan Lingkungan Hidup agar kita sadar akan peduli lingkungan.

C. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengalami beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil dari penelitian yang dilakukan. Adapun keterbatasan tersebut antara lain dalam hal melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi, dikarenakan keterbatasan waktu yang tersedia untuk menyelesaikan penelitian ini dan subyektifitas yang ada pada peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Yuniadhi. 2011. Menganalkan Green Lifestyle ke Anak Lewat Buku. <http://www.Kompaas.com/female/read/2011/03/04.mengenalkan.green.life> style.
- Ashari. 2008. *Hubungan Sekolah dengan Masyarakat*. (Online) (<http://asharikeren.wordpress.com/2008/06/15/hubungan-sekolah-dengan-masyarakat>, diakses pada 19 Mei 2017).
- Edi Suharto. (2006). *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Edi Wibowo. (2006). *Kebijakan Publik Dan Budaya*. Yogyakarta: YPAPI.
- Fajri Wardah. 2011. Bawa Tas Sendiri Saat Belanja! <http://www.travel.kompas.com/read/2011/03/0708271770/>.
- H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho. (2009). *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Leo Agustino. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: CV. Alfabeta.
- Kementerian Lingkungan Hidup. (2013). *Panduan Adiwiyata Sekolah Peduli dan Berwawasan Lingkungan*. Semarang: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Badan Lingkungan Hidup.
- Mardikanto. (2013). *Redefinisi dan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian*. Surakarta: Pusat Pengembangan Agrobisnis dan Perhutanan Sosial.
- Mawardi, dkk. (2011). *Akhlaq Lingkungan*. Yogyakarta: Deputi Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- Nanik Hidayati. (2013). *Perilaku Warga Sekolah dalam Mengimplementasikan Program Adiwiyata (Studi Kasus SMK Negeri 2 Semarang)*. Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
- Oktavia Anggun Prawitrasari. 2013. *Hubungan antara Tingkat Pendidikan dengan Partisipasi Masyarakat dalam Program Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Desa Plantaran Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Tahun 2013*. Skripsi. Unnes FIS.
- Riant Nugroho. (2008). *Kebijakan Pendidikan Yang Unggul*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

- Rusdiana. (2015). *Kebijakan Pendidikan Dari Filosofi Ke Implementasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Salim Emil. (1983). *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Mutiara.
- Samodra Wibawa., et.al. (2006). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Solichin Abdul Wahab. (2008). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Sri Suwitri. (2011). *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Sri Widayati. (2010). Pengertian Sampah, Cara Pemusnahan dan Pemanfaatan Sampah. www.g-excess.com.
- Susapti, P. (2010). Pembelajaran Berbasis Alam. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga. *Jurnal Mudarrisa* 2 (1).
- Syafaruddin. 2008. *Efektivitas Kebijakan Pendidikan*. Jakarta : Penerbit Rineka Cipta.
- Syukri Hamzah. (2013). *Pendidikan Lingkungan*. Bandung: PT. Rafieka Aditama.
- Usman, M. U. (2006). *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Yayasan Garuda Nusantara.2014. *Remaja Shabat Alam*. Jakarta: Yayasan Garuda Nusantara.
- Yeremias T. Keban. (2004). *Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*, Yogyakarta, Penerbit Gava Media.
- Yuliandari, Widyanti. 2014. *Pengelolaan Lingkungan Skala Rumah Tangga*. <http://www.Widyantiyuliandari.com>.
- Zainal, Abidin Said. (2004). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. SURAT-SURAT PERIZINAN

PERSETUJUAN

Proposal skripsi berjudul “Partisipasi Siswa dalam Implementasi PLH (Pendidikan Lingkungan Hidup) di SMP Negeri 7 Yogyakarta” disusun oleh:

Nama : Satya Laksana
NIM : 13110241034
Prodi : Kebijakan Pendidikan
Jurusan : Filsafat dan Sosiologi Pendidikan
Fakultas : Fakultas Ilmu Pendidikan

Telah diketahui dan disetujui pada bulan Maret sebagai persyaratan pengambilan data untuk penelitian skripsi.

Yogyakarta, 9 Maret 2017

Menyetujui,

Ketua Jurusan FSP,

Dosen Pembimbing,



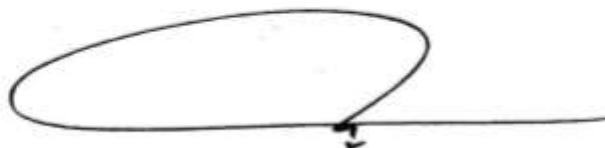
Dr. Arif Rohman, M.Si.
NIP 19670329 199412 1002



Aricfa Efiandrum, M. Si.
NIP 19740411 199802 2004

Mengetahui,

Wakil Dekan 1 FIP UNY,



Dr. Suwarjo, M.Si.
NIP 19650915 199412 1 001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telpun (0274) 540611 pesawat 405, Fax (0274) 5406611
Laman: fip.uny.ac.id, E-mail: humas_fip@uny.ac.id

Nomor : 1539 /UN34.11/PL/2017
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

10 Maret 2017

Yth. Walikota Yogyakarta
c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta
Jl. Kenari No.56, Muja-muju, Umbulharjo, Yogyakarta 55165
Telp. (0274) 555241, Fax. (0274) 555241

Diberitahukan dengan hormat, bahwa untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik yang ditetapkan oleh Jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, mahasiswa berikut ini diwajibkan melaksanakan penelitian:

Nama : Satya Laksana
NIM : 13110241034
Prodi/Jurusan : KP/FSP
Alamat : Salakan Jotawang, Bangunharjo, Sewon, Bantul

Sehubungan dengan hal itu, perkenankanlah kami memintakan izin mahasiswa tersebut melaksanakan kegiatan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

Tujuan : Memperoleh Data Penelitian Tugas Akhir Skripsi
Lokasi : SMP Negeri 7 Yogyakarta
Subyek : Kepala Sekolah, Guru, Siswa
Obyek : Partisipasi Siswa Dalam Implementasi Pendidikan Lingkungan Hidup
Waktu : Maret - April 2017
Judul : Partisipasi Siswa Dalam Implementasi PLH (Pendidikan Lingkungan Hidup) di SMP Negeri 7 Yogyakarta

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami mengucapkan terima kasih.



Dekan,

Dr. Haryanto, M.Pd.
NIP196009021987021001

Tembusan:

1. Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Yogyakarta
2. Ketua Jurusan FSP FIP



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 555241, 515865, 562682
Fax (0274) 555241
E-MAIL : pmperizinan@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.pmperizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/0717

16 14/34

Membaca Surat : Dari Dekan Fak. Ilmu Pendidikan - UNY
Nomor : 1539/UN34/11/PL/2017 Tanggal : 10 Maret 2017

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijinkan Kepada : Nama : SATYA LAKSANA
No. Mhs/ NIM : 13110241034
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Ilmu Pendidikan - UNY
Alamat : Jl. Colombo No. 1 Yogyakarta
Penanggungjawab : Ariefa Efeningrum, M. Si
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PARTISIPASI SISWA DALAM IMPLEMENTASI PLH (PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP) DI SMP NEGERI 7 YOGYAKARTA

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 13 Maret 2017 s/d 13 Juni 2017
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cc. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

SATYA LAKSANA

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 13 Maret 2017

An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Sekretaris

Dra. CHRISTY DEWAYANI MM
NIP. 196304081980032019

Tembusan Kepada

- Yth : 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta
3. Kepala SMP Negeri 7 Yogyakarta
4. Dekan Fak. Ilmu Pendidikan - UNY

LAMPIRAN 2. PEDOMAN OBSERVASI, WAWANCARA, DAN DOKUMENTASI

Pedoman Observasi

NO	Aspek yang diamati	Indikator yang dicari	Sumber Data
1	Observasi Fisik/kondisi lingkungan	Keadaan sekolah	Pengamatan Peneliti
		Letak dan alamat	
		Sarana dan prasarana sekolah	
		Fasilitas penunjang	
2	Observasi Kegiatan	Interaksi warga sekolah	
		Pelaksanaan program	
		Kegiatan siswa	

Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara untuk Kepala Sekolah

A. Identitas Diri

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Pekerjaan :
4. Pendidikan :
5. Alamat :

B. Pertanyaan Penelitian

1. Berapa lama ibu menjabat sebagai kepala sekolah di SMP N 7 Yogyakarta ?
2. Bagaimana sejarah berdirinya SMP N 7 Yogyakarta ?
3. Menurut Ibu apa itu Pendidikan Lingkungan Hidup ?
4. Apa yang menjadi latar belakang adanya Pendidikan Lingkungan Hidup?
5. Sejak kapan Pendidikan Lingkungan Hidup di implementasikan di SMP 7 Yogyakarta ?
6. Seperti apa bentuk sosialisasi Pendidikan Lingkungan Hidup di kalangan siswa ?
7. Bagaimana bentuk implementasi Pendidikan Lingkungan Hidup di SMP N 7 Yogyakarta ?
8. Bagaimana bentuk partisipasi siswa dalam implementasi Pendidikan Lingkungan hidup tersebut ?
9. Apa saja kegiatan dalam Pendidikan Lingkungan Hidup tersebut ?
10. Apa saja sarana dan prasarana yang menunjang Pendidikan Lingkungan Hidup di SMP N 7 Yogyakarta ?
11. Bagaimana partisipasi siswa dalam mencapai tujuan Pendidikan Lingkungan Hidup ?
12. Bagaimana partisipasi siswa dalam badan yang melaksanakan Pendidikan Lingkungan Hidup ?
13. Bagaimana partisipasi siswa berdampak pada implementasi Pendidikan Lingkungan Hidup di SMP N 7 Yogyakarta ?
14. Bagaimana partisipasi siswa dalam menyikapi Pendidikan Lingkungan Hidup tersebut ?
15. Bagaimana partisipasi siswa dalam tindakannya di Pendidikan Lingkungan Hidup tersebut ?
16. Bagaimana partisipasi siswa dalam sumber dayanya dalam implementasi Pendidikan Lingkungan Hidup di SMP N 7 Yogyakarta ?
17. Bagaimana partisipasi siswa dalam komunikasi kepada pembuat kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup ?
18. Apa saja faktor pendukung dalam Implementasi Pendidikan Lingkungan Hidup di SMP N 7 Yogyakarta ?
19. Apa saja faktor penghambat dalam Implementasi Pendidikan Lingkungan Hidup di SMP N 7 Yogyakarta ?

20. Apa solusi untuk hambatan tersebut ?

Pedoman Wawancara untuk Guru

A. Identitas Diri

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Pekerjaan :
4. Pendidikan :
5. Alamat :

B. Pertanyaan Penelitian

1. Berapa lama bapak atau ibu menjabat sebagai guru di SMP N 7 Yogyakarta ?
2. Menurut Ibu apa itu Pendidikan Lingkungan Hidup ?
3. Seperti apa bentuk sosialisasi Pendidikan Lingkungan Hidup di kalangan siswa ?
4. Bagaimana bentuk implementasi Pendidikan Lingkungan Hidup di SMP N 7 Yogyakarta ?
5. Bagaimana bentuk partisipasi siswa dalam implementasi Pendidikan Lingkungan hidup tersebut ?
6. Apa saja kegiatan dalam Pendidikan Lingkungan Hidup tersebut ?
7. Apa saja sarana dan prasarana yang menunjang Pendidikan Lingkungan Hidup di SMP N 7 Yogyakarta ?
8. Bagaimana partisipasi siswa dalam mencapai tujuan Pendidikan Lingkungan Hidup ?
9. Bagaimana partisipasi siswa dalam badan yang melaksanakan Pendidikan Lingkungan Hidup ?
10. Bagaimana partisipasi siswa berdampak pada implementasi Pendidikan Lingkungan Hidup di SMP N 7 Yogyakarta ?
11. Bagaimana partisipasi siswa dalam menyikapi Pendidikan Lingkungan Hidup tersebut ?
12. Bagaimana partisipasi siswa dalam tindakannya di Pendidikan Lingkungan Hidup tersebut ?
13. Bagaimana partisipasi siswa dalam sumber dayanya dalam implementasi Pendidikan Lingkungan Hidup di SMP N 7 Yogyakarta ?
14. Bagaimana partisipasi siswa dalam komunikasi kepada pembuat kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup ?
15. Apa saja faktor pendukung dalam Implementasi Pendidikan Lingkungan Hidup di SMP N 7 Yogyakarta ?
16. Apa saja faktor penghambat dalam Implementasi Pendidikan Lingkungan Hidup di SMP N 7 Yogyakarta ?
17. Apa solusi untuk hambatan tersebut ?

Pedoman Wawancara untuk Siswa

A. Identitas Diri

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Pekerjaan :
4. Pendidikan :
5. Alamat :

B. Pertanyaan Penelitian

1. Anda sekarang duduk di kelas berapa ?
2. Menurut anda apa itu Pendidikan Lingkungan Hidup ?
3. Seperti apa bentuk sosialisasi Pendidikan Lingkungan Hidup di kalangan siswa ?
4. Bagaimana bentuk implementasi Pendidikan Lingkungan Hidup di SMP N 7 Yogyakarta ?
5. Bagaimana bentuk partisipasi siswa dalam implementasi Pendidikan Lingkungan hidup tersebut ?
6. Apa saja kegiatan dalam Pendidikan Lingkungan Hidup tersebut ?
7. Apa saja sarana dan prasarana yang menunjang Pendidikan Lingkungan Hidup di SMP N 7 Yogyakarta ?
8. Bagaimana partisipasi siswa dalam mencapai tujuan Pendidikan Lingkungan Hidup ?
9. Bagaimana partisipasi siswa dalam badan yang melaksanakan Pendidikan Lingkungan Hidup ?
10. Bagaimana partisipasi siswa berdampak pada implementasi Pendidikan Lingkungan Hidup di SMP N 7 Yogyakarta ?
11. Bagaimana partisipasi siswa dalam menyikapi Pendidikan Lingkungan Hidup tersebut ?
12. Bagaimana partisipasi siswa dalam tindakannya di Pendidikan Lingkungan Hidup tersebut ?
13. Bagaimana partisipasi siswa dalam sumber dayanya dalam implementasi Pendidikan Lingkungan Hidup di SMP N 7 Yogyakarta ?
14. Bagaimana partisipasi siswa dalam komunikasi kepada pembuat kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup ?
15. Apa saja faktor pendukung dalam Implementasi Pendidikan Lingkungan Hidup di SMP N 7 Yogyakarta ?
16. Apa saja faktor penghambat dalam Implementasi Pendidikan Lingkungan Hidup di SMP N 7 Yogyakarta ?
17. Apa solusi untuk hambatan tersebut ?

Pedoman Dokumentasi

No	Aspek yang dicari	Indikator yang dicari	Sumber
1	SMP Negeri 7 Yogyakarta	1.Profil Sekolah	Data Sekolah
		2.Visi Misi	
		3.Data Siswa	
		4.Data pendidik dan tenaga kependidikan	
		5.Sarana dan prasarana sekolah	
2	Materi	1.Silabus	Guru
		2.RPP	

LAMPIRAN 3. ANALISIS DATA HASIL WAWANCARA

Pertanyaan Wawancara: Seperti apa bentuk sosialisasi Pendidikan Lingkungan Hidup di kalangan siswa?

Sumber	Hasil wawancara	Reduksi	Kesimpulan
Bu Pur	<p>“yang sudah dilakukan SMP 7 ini sebenarnya kan kemarin kebetulan SMP 7 itu sebagai Pilot Project dari GIS. GIS itu suatu organisasi lingkungan hidup dari Jerman, LSM dari Jerman. Di Jogja hanya SMP 7, kalau yang lainnya itu di tingkat SLTA. itu ada satu kegiatan yang namanya Ekomepi, ya itu bentuk dari kesadaran lingkungan, Global Warming dan sebagainya. itu dilakukan selama setengah tahunan, setengah tahunan pendidikan. ada lima <i>seasion</i> waktu itu. nah dari situ ada kader, pengkaderan. ada 40 siswa diajak mengetahui, menemukan permasalahan-permasalahan lingkungan yang ada di SMP 7. dari mulai sampahnya, energinya, airnya, sanitasinya dan sebagainya itu. kemudian diajak untuk mencari solusi. itu kemarin dari Ekomaping salah satunya. kemudian dari program ekomaping itulah kemudian kita menentukan rencana aksi yang bisa kita lakukan. kebetulan di SMP 7 yang paling urgen adalah sampah. maka program</p>	<p>Bentuk sosialisasi pendidikan lingkungan hidup di kalangan siswa yaitu diantaranya berupa program pilot project dari suatu organisasi dari Jerman. Selain itu juga masih banyak lagi program sosialisasi tentang pendidikan lingkungan hidup di kalangan siswa.</p>	<p>Sosialisasi sudah dilakukan di kalangan siswa bersumber dari internal maupun eksternal sekolah.</p>

	kami itu adalah sampah. bentuknya adalah penghilangan itu tidak tapi pengurangan dan mengolah sampah” (Wawancara dengan Guru di SMP N 7 Yogyakarta)		
Siswa	“kalau untuk sosialisasi seperti itu kita ada... apa itu namanya, program itu. jadi kita ada program membawa bekal sekaligus ceklis kela, itu terkadang itu juga diingatkan waktu upacara saat guru pembina upacara mengatakan”	Adanya suatu program membawa bekal makanan untuk setiap siswa dan ada program ceklis kelas.	

Pertanyaan Wawancara: Bagaimana bentuk implementasi Pendidikan Lingkungan Hidup di SMP N 7 Yogyakarta ?

Sumber	Hasil wawancara	Reduksi	Kesimpulan
	<p>dari 40 ini kan ibaratnya sebagai kader yang tujuan arah kedepannya adalh nanti yang bisa menyebarkan ke teman-temannya. menjadi virus baik bagi teman-temannya. 40 anak ini kan dari setiap kelas mas. jadi nanti yang akan menjadi penggerak di kelas-kelas. nah termasuk disini penggerak dalam hal sampah. kebetulan kan disini untuk sampah itu kita punya program ada yang namanya awalnya membawa bekal, aksi membawa bekal. dalam hal mengurangi itu dengan membawa bekal. kemudian pilah sampah, pilah sampah itu anak-anak di kelas kan tetap jajan, walaupun sudah ada membawa bekal. terus yang jajan itu kan ada memilah dengan botol-botolnya itu, jajan yang botol itu dikumpulkan. dikumpulkan sendiri di kelas, tidak dibuang di tempat sampah. terus kemudian dari perkelas itu dikumpulkan di bank sampah. itu salah satu programnya. kemudian ada yang namanya ceklis kelas”</p>	<p>Impelmentasi pendidikan lingkungan hidup ini juga terjadi di dalam siswa yang memberikan atau menumbuhkan virus baik pada anak untuk menjadi kader bagi siswa semua. Kader disini mempunyai tugas untuk menyebarkan kepada anak-anak yang lainnya.</p>	<p>Implementasi pendidikan lingkungan hidup sudh dilakukan dengan baik</p>

Siswa	kalau kantor bank sampah sih kita sudah punya sendiri. itu sudah ada meja lengkap dengan dokumen-dokumen. jadi kita memilah sampah lah mas. memilah sampah botol segala macam itu. Dipilah, lalu ada bank sampah mgunani dateng, lalu dijual. dalam sisi ini kan justru menguntungkan bagi kita gitu kan mas	.adanya suatu kantor bank untuk mewujudkan adanya suatu implementasi pendidikan lingkungan hidup.	
-------	--	---	--

Pertanyaan Wawancara: Apa saja sarana dan prasarana yang menunjang Pendidikan Lingkungan Hidup di SMP N 7 Yogyakarta?

Sumber	Hasil wawancara	Reduksi	Kesimpulan
guru	kalau ini dulu awalnya kami difasilitasi oleh BLH, dengan dibagi kantong-kantong plastik dan bagor itu, di kelas	Adanya kantong-kantong plastik dan bagor.	Sarana prasarana sudah cukup memadai. Hanya saja masih terdapat beberapa kelas yang belum ada tempat sampah terpisah antara sampah organik dan non organik.
guru	bentuknya itu yang kayak drum, yang kayak besi, bak sampah yang besi itu. terus ada yang dorong tinggi itu ada	Adanya drum tempat sampah, serta dorongan yang tinggi.	
Siswa	sarana prasarana juga udah ada, meskipun belum lengkap gitu. jadi, itu emang udah ada tapi belum setiap kelas. misalnya sampah plastik sampah organik gitu	Sudah ada tempat sampah organik dan sampah non organik hanya belum semua kelas ada.	

Pertanyaan Wawancara: Bagaimana partisipasi siswa dalam mencapai tujuan Pendidikan Lingkungan Hidup?

Sumber	Hasil wawancara	Reduksi	Kesimpulan
Guru	itu suatu kegiatan yang tujuannya menyadarkan anak didik untuk lebih peduli terhadap lingkungan. peduli dalam artian bahwa sadar akan perubahan iklim dan sebagainya. kemudian memanfaatkan, ibaratnya peduli dengan lingkungan itu dalam artian ya pemanasan globalnya, sampahnya dan sebagainya. kalau bisa sampai bisa mengolah sampah itu	Partisipasi yang dilakukan oleh siswa dalam hal ini yaitu ikut mengelola sampah yang ada di lingkungan sekolah.	Partisipasi yang dilakukan oleh siswa untuk menunjang tujuan pendidikan lingkungan hidup di sekolah sudah terjadi di SMP N 7 Yogyakarta.
Siswa	pendidikan lingkungan hidup berarti pendidikan untuk mengajak siswa peduli terhadap lingkungan. peduli itu ya artinya kalau memang sudah bagus ya merawat, menjaga. kalau belum bagus ya mengembalikan, kalau rusak ya mengelolanya	Mengajak siswa untuk selalu peduli terhadap lingkungan dengan menjaga dan merawat lingkungan sekitar sekolah maupun di luar sekolah.	

Pertanyaan Wawancara: Bagaimana partisipasi siswa dalam badan yang melaksanakan Pendidikan Lingkungan Hidup?

Sumber	Hasil wawancara	Reduksi	Kesimpulan
guru	Untuk program ini, selama ini belum. selama ini daya dukungnya berupa, kalau dari komite ya itu ya hanya mendukungnya ya dalam membuat/mengolah sampah dengan membuat kerajinan-kerajinan itu kemarin kita sempat kerja sama dengan komite untuk membimbing anak mebuat kerajinan. tapi kalau dari segi dana kami belum	Sejauh ini partisipasi siswa belum maksimal dalam badan yang melaksanakan pendidikan lingkungan hidup.	Belum terbentuk atau belum dilaksanakan partisipasi siswa dalam membantu badan yang melaksanakan pendidikan lingkungan hidup.
Siswa	sepertinya kalau sejak dulu sih belum ada sama sekali koordinasi yang lebih serius gitu loh. paling yang paling mendalam itu waktu ditugaskan ke Dinas pendidikan. itu yang kami berbicara serius 4 mata	Sudah terbentuk tim namun, belum ada komunikasi sama sekali dari dulu sampai sekarang	

Pertanyaan Wawancara: Bagaimana partisipasi siswa berdampak pada implementasi Pendidikan Lingkungan Hidup di SMP N 7 Yogyakarta?

Sumber	Hasil wawancara	Reduksi	Kesimpulan
Kepala Sekolah	<p>ya dampaknya positif. artinya tadi memberi contoh, memasukan sampah pada tempatnya, otomatis teman yang lain juga pasti menganggap bahwa itu hal yang positif kan begitu. kalau positif ya mereka megikuti. ketika ada temannya yang bersikap yang lain juga ikut bangga. demikian juga guru, guru juga tahu kalau anak-anaknya cinta terhadap kebersihan, cinta terhadap lingkungan, cinta kepada tanaman akan sebagainya. Ya kadang ada guru begitu tahu ada tanaman yang dia ngambil air pakai plastik itu, saya lirik "oh berarti ada perhatian". ada guru juga, jadi tanaman yang disudut itu disiram dengan kesadaran sendiri akan mengajak atau berbuat sesuatu yang positif, kan begitu</p>	<p>Berdampak positif artinya siswa menjalankan dengan baik dan memberi contoh yang baik pula.</p>	<p>Sudah terjadi beberapa dampak baik untuk sekolah maupun siswa sendiri.</p>
Guru	<p>iya, seperti panjengan bisa lihat, SMP 7 kalau dari segi penghijauan anak-anak kemarin kan ada pembangunan seperti ini kan ada pembangunan. itu tangga kan baru aja, itu sebenarnya disana kan ada pohon rimbun, kemudian ada proyek itu, maka kemudian ada beberapa pohon ditebang pun anak-anak sebenarnya merasa kehilangan. kalau buat saya itu sudah bentuk dari</p>	<p>Dapat dilihat dari penghijauan di sekolah ini tidak lepas dari kegiatan siswa yang peduli dengan lingkungan sekolah</p>	

	kesadaran anak bahwa "bu kasian bu itu pohonnya diginikan" menurut saya itu sudah bentuk kesadran anak tentang penghijauan. kemudian kalau sampah ya memang yang namanya anak ya memang harus rutin untuk di elingkan. tapi sudah lumayan sampah itu tidak berceceran		
Siswa	itu dampaknya cuman sedikit sih. jadi sampahnya nggak langsung hilang semua, tapi ada pengurangan	Hanya terjadi beberapa dampak tidak mempengaruhi semua pihak namun mengarah ke lebih baik.	

Pertanyaan Wawancara: Bagaimana partisipasi siswa dalam menyikapi Pendidikan Lingkungan Hidup tersebut ?

Sumber	Hasil wawancara	Reduksi	Kesimpulan
Siswa	ya kalau itu sih ada senengnya ada susahnyanya. kalau senengnya kan kita menyadari siswa lainnya untuk juga ikut serta dalam memelihara lingkungan. sedangkan susahnyanya mungkin masih ada beberapa siswa yang tidak konsisten dengan pelaksanaan seperti itu	Sudah ada siswa yang menyikapi dengan baik namun juga masih ada siswa yang belum menyikapi secara baik.	Sikap yang dimunculkan dari dalam diri anak sudah baik. Siswa merespon hal ini juga sudah baik.

Siswa	itu bagus juga sih, bagusnya itu bisa nambah pengetahuan kita tentang lingkungan hidup, tentang gimana buat ngelestariin lingkungan hidup juga. tapi nggak enakya itu sama temen-temen kalau dikasih sosialisasi itu pada ramai sendiri gitu loh. jadi rasanya.	Untuk siswa yang menyikapi dengan baik itu dapat menambah pengetahuan tentang lingkungan hidup.	
-------	---	---	--

Pertanyaan Wawancara: Bagaimana partisipasi siswa dalam sumber dayanya dalam implementasi Pendidikan Lingkungan Hidup di SMP N 7 Yogyakarta?

Sumber	Hasil wawancara	Reduksi	Kesimpulan
Kepala Sekolah	sarana dan prasarana cukup. artinya bahwa semua program terciptanya pelestarian lingkungan ini, itu sekolah menganggarkan juga. baik itu dari BOS, maupun mungkin kadang-kadang dari orang tua atau masyarakat yang mau memberikan tanaman. disamping itu BLH sendiri juga sering membantu. misalnya memberikan pelatihan atau mungkin memberikan bak-bak sampah yang bermanfaat untuk sekolah ini. jadi masyarakat dan orang tua juga memberikan tanaman juga ada. tapi belum begitu banyak. kalau sarana-prasarana cukup, pot-pot ada, rabuk-rabuk disediakan sekolah artinya pot yang pecah itu sudah kita anggar, perlu dicek. dan menurut saya	Sudah cukup baik partisipasi siswanya dalam sumberdaya pengimplementasian pendidikan lingkungan hidup di sekolah	Sudah terlaksana dengan baik

	<p>kami selalu memperhatikan supaya sekolah ini nampak asri dan bersih. tapi saya juga belum puas dengan seperti ini, saya penginnya tetep bersih. besok nggak perlu saya sebagai kepala sekolah ngontrol. mungkin teman-teman atau mungkin semuanya merasa bahwa itu miliknya, maka ya tidak perlu diingatkan, sudah langsung berangkat dari pribadinya.</p>		
Guru	<p>dari sudut pandang ya kadang kalau yang saya tanyain "mengapa kok nggak membawa bekal"? biasanya ini kan juga daya dukung dari orang tua, karena kadang orang tua tidak masak, karena praktis jadi mending bawa bekal uang saja. Sebenarnya permasalahannya seperti itu. anak-anak sebenarnya kalau saya tanya yang membawa bekal merasa lebih enak, lebih meras dari segi giziya. sebenarnya kesadarannya tinggi, cuma kadang daya dukung dari... kan ini meliputi banyak unsur ya. nah usaha kami sudah sebenarnya dengan sosialisasi ke orang tua juga</p>	<p>Sudah didukung dengan siswa yaitu siswa membawa bekal sendiri dari rumah</p>	

Siswa	iya, menjalankan program. kan itu ada 40 anak. jadi kita kan udah, karena dulu waktu kami kelas VII sebenarnya sudah dibuat organisasi semacam ini. cuma belum berkembang karena mungkin tidak ada yang ketua, wakil ketua... tidak ada	Tertib dan disiplin karena ada 40 anak untuk mengkoordinir semuanya	
-------	---	---	--

Pertanyaan Wawancara: Bagaimana partisipasi siswa dalam komunikasi kepada pembuat kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup?

Sumber	Hasil wawancara	Reduksi	Kesimpulan
Guru	kalau itu sebenarnya kan tidak cuma saya. saya juga nggak mungkin kan semua saya. kalau untuk saya ya biasanya kalau pas itu dipembelajaran ya kadang saya senggolkan dengan pembelajaran, saya berikan pemahaman lewat pembelajaran. termasuk mungkin dari sekitar lingkungan. mungkin dari sampahnya, dari membawa bekalnya. jadi kita program ya kadang saat pembelajaran kita senggolkan. dan yang jelas kalau setiap saat saya temuin pelanggaran sesuatu yang tidak pas bagi saya saya <i>elingkan</i> langsung ditempat	Komunikasi tentang pendidikan lingkungan hidup biasanya disangkut pautkan pada setiap pembelajaran	Sudah berjalan dengan baik dan lancar

Siswa	ada, itu kaya lewat WA. jadi kita konsultasi gitu kayak curhat gitu. terus ada kabar-kabaran juga gimana-gimana gitu	Ada grup WA annantara guru dengan siswa sehingga komunikasi berjalan dengan baik	
-------	--	--	--

Pertanyaan Wawancara: Apa saja faktor pendukung dalam Implementasi Pendidikan Lingkungan Hidup di SMP N 7 Yogyakarta?

Sumber	Hasil wawancara	Reduksi	Kesimpulan
Guru	pendukungnya di sini jelas, misalnya kita lingkungannya kecil. gampang diolah lah. Kemudian juga saya datang sudah dengan fisik seperti ini, sudah hijau. kemudian emang klining service ada, tapi tidak <i>ter-cover</i> semua. itu juga masih melibatkan yang lain gitu. kemudian disini dari TU itu ada program setiap Jumat ada Jumat Bersih. kemudian dari siswanya tadi kesadaran sudah mulai tumbuh. tapi ya masih tetep terus di perjuangkan. yang tua juga banyak yang belum itu. terus kemudian juga disini selain Adi Wiyata, walaupun masih setingkat kota tapi sini ini sudah sekolah sehat. jadi kan saling mendukung ya kalau sekolah sehat dengan sekolah Adi wiyata	Faktor pendukungnya yaitu sampah banyak yang gampang diolah serta lingkungan sudah hijau	Faktor pendikung pasti ada dalam menunjang pendiidkkan lingkungan hidup

Siswa	udah banyak siswa yang mau menjaga lingkungan sekolah gitu	Banyak siswa yang sudah mau menjaga lingkungan	
-------	--	--	--

Pertanyaan Wawancara: Apa saja faktor penghambat dalam Implementasi Pendidikan Lingkungan Hidup di SMP N 7 Yogyakarta?

Sumber	Hasil wawancara	Reduksi	Kesimpulan
Guru	yang menghambat kalau menurut saya itu waktu buat bimbingan. saya merasa tugas guru sangat banyak, sangat padat. sehingga waktu untuk bisa sangat sedikit. jadi waktu akademik itu sudah padat, belum nanti ditambah tugas-tugas lain. sebenarnya ya misalnya kalau fokus ke karya tulis. itu kan butuh kepedulian yang besar, perhatian yang besar, nah itu tersandung. padahal semua guru juga sama minimal 25 jam.	Guru tugas tegas dalam membimbing anak adalah salah satu faktor penghambat	Masih terdapat faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup ini.
Guru	kalau orang tua nggak, mendukung. di sini ya masih kesadaran, bahwa tidak semua guru, kalau mendukung itu sih mendukung. tapi dalam artian tindakan riilnya itu kadang tidak semuanya bisa, se-open se pedulinya itu, loyalitasnya itu tidak sama. kadang misalnya, contoh saja kita bersih-bersih semua kelas. seharusnya kan guru itu yang mendampingi. tapi kan tidak semua guru seperti itu. kadang ada yang nggak ndampingi. terus kita program kalau kan setiap ada pembelajaran kan dikondisikan kalau belum bersih kan kita tunda pembelajran dulu, bersihkan. tapi kan tidak	Adanya dukungan dari orang tua merupakan salah satu faktor pendukung dalam pengimplementasian	

	semuanya seperti itu. jadi kan kadang " oh ibu itu bilang gitu, oh ibu itu kok dinengke wae" seperti itu kan juga akhirnya mempengaruhi ke anak		
Kepala Sekolah	penghambatnya adalah kesadaran pribadi yang harus dibangkitkan pada semua insan yang ada di SMP ini. lalu berikutnya adalah pembiayaan, ini kan butuh pembiayaan. kami butuh alat untuk menyemprot tanaman, kami butuh rabuk yang disuport terus, kami butuh tenaga ahli taman, nggak ada disini kan butuh itu ahli taman. sarana prasarana ya pasti belum maksimal saya sampaikan. saya penginnya di atas sini semuanya tergantung tanaman rambat-rambatan yang bagus. tapi kan idealis, kita kan tempatnya panas Jogja ini. kalau di kaliurang ada saya bawa sini mati, saya kunjungan ke bandung kan juga bawa tanaman, mati, disana hidup semua kan daerah dingin. saya ke Wonosobo, dieng kemana-mana saya. tapi alhamdulillah ini sudah bisa.	Kesadaran diri siswa itu juga menghambat implementasi pendidikan lingkungan hidup	

Lampiran 4. Dokumentasi Foto

Lampiran 4. Dokumentasi Foto



Gambar 1. Wawancara terhadap siswa oleh peneliti



Gambar 2. Salah satu slogan PLH di SMP N 7 Yogyakarta



Gambar 3. Tempat sampah organik di SMP N 7 Yogyakarta



3

Gambar 4. Guru mencontohkan cara merawat tanaman



Gambar 5. Memilah sampah botol bekas yang masih layak dibuat karya



Gambar 6. Guru mencontohkan sampah botol bekas yang masih layak



Gambar 7. Petugas Bank Sampah sedang mengumpulkan sampah



Gambar 8. Siswa sedang membawa sampah menuju Bank Sampah



Gambar 9. Peneliti sedang menyerahkan poster kenang-kenangan kepada ibu Pur selaku narasumber